

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKjIP)

**DINAS PERDAGANGAN
KABUPATEN BONE
TAHUN 2019**



**DINAS PERDAGANGAN
KABUPATEN BONE**

Jln. Laks. Yos. Sudarso No. 29
Tlp/Fax. (0481)21028

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kita panjatkan kehadiran Allah SWT atas segala limpahan Rahmat dan Karunia-Nya, sehingga penyusunan Laporan Kinerja (LKj) Dinas Perdagangan Kabupaten Bone Tahun 2019 dapat diselesaikan, sebagai bentuk akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan selama Tahun 2019

Laporan Kinerja (LKj) Dinas Perdagangan Tahun 2019 merupakan capaian akuntabilitas kinerja pada tahun keempat dalam masa RENSTRA Tahun 2018-2023 LKj Tahun 2019 disusun berdasarkan Rencana Kerja (RENJA) Tahun 2019 yang dijabarkan dari Rencana Strategis (RENSTRA Tahun 2018-2023).

LKj Dinas Perdagangan disusun berdasarkan pada Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan berpedoman pada Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014. Penyusunan LKj Dinas Perdagangan Tahun 2019 merupakan bentuk komitmen terhadap aspek transparansi dan akuntabilitas serta pertanggungjawaban atas kinerja Dinas Perdagangan. Komitmen dalam penyusunan LKj Dinas Perdagangan, bertujuan memberikan informasi kinerja yang terukur, sekaligus sebagai upaya perbaikan berkesinambungan bagi Dinas Perdagangan untuk senantiasa meningkatkan kinerjanya.


Cakupan LKj Dinas Perdagangan Tahun 2019 terdiri atas : Pendahuluan, Perencanaan & Perjanjian Kinerja, Akuntabilitas Kinerja dan inovasi dalam skema reformasi birokrasi. Pendahuluan memiliki muatan uraian singkat organisasi, seperti : latar, maksud, isu strategis, dan struktur serta keragaman sumberdaya manusia di Dinas Perdagangan. Adapun aspek Perencanaan dan Perjanjian Kinerja menggambarkan visi, misi, tujuan, sasaran, IKU dan PK. Sedangkan aspek akuntabilitas kinerja, memberikan gambaran capaian, analisa, dan evaluasi terhadap indikator kinerja utama Dinas Perdagangan pada tahun 2019, termasuk atas analisa efisiensi penggunaan sumberdaya.

Secara keseluruhan penyelenggaraan tugas-tugas Dinas Perdagangan Tahun 2019 telah banyak membuahkan hasil yang positif. Dari 6 (Enam) indikator kinerja utama, terdapat 2 (dua) indikator yang telah melebihi target yang ditetapkan. Namun disadari, masih terdapat beberapa indikator kinerja yang belum tercapai. Analisa dan evaluasi atas capaian kinerja secara komprehensif digunakan sebagai pijakan untuk melakukan perbaikan pelayanan dan mendukung tercapainya good governance pada masa mendatang. Berkenaan dengan itu, LKj Dinas Perdagangan Tahun 2019 ini, dapat menjadi masukan dan saran evaluasi agar kinerja kedepan menjadi lebih produktif, efektif dan efisien, baik dari aspek perencanaan, pengorganisasian, manajemen keuangan maupun koordinasi pelaksanaannya.

Terima kasih

Watampone, 04 Februari 2020

Kepala Dinas Perdagangan
Kabupaten Bone



Drs. A. CHAERUL SALEH, SE, MM

Pangkat : Pembina Utama Muda, IV/c

NIP. 19610802 198209 1 001

IKHTISAR EKSEKUTIF

Pelaporan kinerja Dinas Perdagangan Kabupaten Bone melalui penyusunan Laporan Kinerja (LKj) ini menjadi salah satu upaya yang dilakukan Dinas Perdagangan Kabupaten Bone untuk mendorong tata kelola pemerintahan yang baik. Proses penilaian yang terukur ini menjadi bagian dari skema pembelajaran bagi organisasi Dinas Perdagangan Kabupaten Bone untuk terus meningkatkan kapasitas kelembagaan sehingga kinerjanya bisa terus ditingkatkan. Dinas Perdagangan Kabupaten Bone tahun 2019 ini merupakan amanat Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, dan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Penyusunan LKj dilakukan dengan mendasarkan pada Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2018 di mana pelaporan capaian kinerja organisasi disusun secara transparan dan akuntabel merupakan bentuk pertanggungjawaban atas kinerja Dinas Perdagangan Kabupaten Bone

Analisa dan bukti-bukti pendukung pencapaian kinerja menjadi bagian dalam penyusunan LKj ini, untuk menjawab pertanyaan sejauh mana sasaran pembangunan yang ditunjukkan dengan keberhasilan pencapaian indikator kinerja utama (IKU) yang telah dicanangkan pada tahun 2019 telah berhasil dicapai.

IKU yang kinerjanya mencapai Lebih 100% atau lebih besar dari target yang ditetapkan untuk tahun 2019 yaitu : Kontribusi sector Perdagangan terhadap PDRB, Cakupan bina kelompok pedagang/usaha informal %) , yang mencapai 100% yaitu: Persentase Alat UTTP yang Lolos Uji Tera Ulang, dan Persentase Laporan Konsumen yang diTindak Lanjuti, Persentase Potensi Komoditi Unggulan Kabupaten yang terpublikasi Sedangkan ada 1 (satu) indikator kinerja sasaran yang lainnya realisasinya dibawah 100% yaitu : Persentase Pasar dalam Kondisi Baik.

Evaluasi atas data-data pendukung dan permasalahan atas setiap sasaran menunjukkan beberapa tantangan yang perlu menjadi perhatian bagi Dinas Perdagangan Kabupaten Bone ke depan. Pertama, walaupun beberapa IKU telah mencapai target yang sangat baik, masih terdapat beberapa persoalan-persoalan di masyarakat yang belum sepenuhnya bisa dijawab dengan baik.

Hasil evaluasi capaian kinerja ini juga penting dipergunakan sebagai pijakan bagi Dinas Perdagangan di lingkungan pemerintah Kabupaten Bone dalam perbaikan pelayanan publik di tahun yang akan datang.

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	2
IKHTISAR EKSEKUTIF	3
DAFTAR ISI	4
DAFTAR TABEL	5
DAFTAR GAMBAR	6
BAB I PENDAHULUAN	7
1.1 Latar Belakang	7
1.2 Maksud dan Tujuan	8
1.3 Gambaran Umum Organisasi	8
1.4 Isu Strategis	13
1.5 Inovasi Pelayanan Publik	13
BAB II PERENCANAAN KINERJA	15
2.1 Rencana Strategis	16
2.1.1 Visi dan Misi BUPATI DAN WAKIL BUPATI	16
2.1.2 Tujuan dan Indikator Kinerja	17
2.1.3 Sasaran dan Indikator Kinerja	18
2.1.4 Program untuk Pencapaian Sasaran	19
2.2 Perjanjian Kinerja Tahun 2019	20
2.3 Indikator Kinerja Utama (IKU)	21
2.4 Rencana Anggaran Tahun 2019	22
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	26
3.1 Capaian Kinerja Organisasi	26
3.1.1 Capaian Indikator Kinerja Tahun 2019	27
3.1.2 Capaian Indikator Kinerja Utama (IKU)	28
3.1.3 Perbandingan Capaian Kinerja	29
3.2 Realisasi Anggaran	52
BAB IV PENUTUP	55

LAMPIRAN

Daftar Tabel

Tabel 1.1	Komposisi Pegawai Dinas Perdagangan Kabupaten Bone berdasarkan Jenis Kelamin	10
Tabel 1.2	Komposisi Pegawai Dinas Perdagangan Kabupaten Bone berdasarkan Pangakt/Golongan	11
Tabel 1.3	Komposisi Pegawai Dinas Perdagangan Kabupaten Bone Berdasarkan Tingkat Pendidikan	12
Tabel 2.1	Tujuan dan Indikator Kinerja Dinas Perdagangan	18
Tabel 2.2	Sasaran dan Indikator Kinerja Dinas Perdagangan	19
Tabel 2.3	Program untuk Pencapaian Sasaran Tahun 2019	20
Tabel 2.4	Perjanjian Kinerja Dinas Perdagangan Tahun 2019	21
Tabel 2.5	IKU Dinas Perdagangan	21
Tabel 2.6	Rencana Belanja Dinas Perdagangan Kabupaten Bone Tahun Anggaran 2019	22
Tabel 2.7	Alokasi Per Sasaran Tahun Anggaran 2019	23
Tabel 3.1	Skala Pengukuran Ordinal	26
Tabel 3.2	Pencapaian Indikator Sasaran	27
Tabel 3.3	Capaian Kinerja Dinas Perdagangan Kabupaten Bone Tahun 2019	27
Tabel 3.4	Capaian Indikator Kinerja Utama Dinas Perdagangan Kabupaten Bone Tahun 2019	28
Tabel 3.5	Capaian Indikator Kinerja Sasaran Meningkatnya Pertumbuhan Ekonomi dari sektor Perdagangan	29
Tabel 3.6	Perkembangan Capaian Indikator Kinerja Sasaran 1.	30
Tabel 3.7	Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2019 dengan Target Akhir Renstra pada sasaran 1	32
Tabel 3.8	Efisiensi Penggunaan Sumber Daya pada Sasaran 1	36
Tabel 3.9	Program dan Kegiatan yang menunjang pencapaian sasaran 1	36
Tabel 3.10	Capaian Indikator Kinerja Sasaran Meningkatnya Perlindungan Konsumen	40
Tabel 3.11	Perbandingan Capaian Indikator Kinerja Sasaran 2.	41
Tabel 3.12	Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2019 dengan Target Akhir Renstra pada sasaran 1	42
Tabel 3.13	Efisiensi Penggunaan Sumber Daya pada Sasaran 2	44
Tabel 3.14	Program dan Kegiatan Menunjang Sasaran 2	45
Tabel 3.15	Capaian Indikator Kinerja Sasaran Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Urusan Perdagangan	47
Tabel 3.16	Perbandingan Capaian Indikator Kinerja Sasaran 3	48
Tabel 3.17	Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2019 dengan Target Akhir Renstra pada sasaran 3	48
Tabel 3.18	Efisiensi Penggunaan Sumber Daya pada Sasaran 3	49
Tabel 3.19	Program dan Kegiatan Menunjang Sasaran 3	50

Daftar Gambar

Gambar 1.1	Struktur Organisasi Dinas Perdagangan Kabupaten Bone	10
Gambar 1.2	Komposisi Pegawai Dinas Perdagangan Kabupaten Bone berdasarkan Jenis Kelamin	11
Gambar 1.3	Komposisi Pegawai Dinas Perdagangan Kabupaten Bone berdasarkan Pangkat/Golongan	11
Gambar 1.4	Komposisi Pegawai Dinas Perdagangan Kabupaten Bone berdasarkan Tingkat Pendidikan	12
Gambar 1.5	Kegiatan Pelayanan dan Pengembangan UKM	14
Gambar 2.1	Komponen Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP)	15
Gambar 3.1	Grafik Perbandingan Capaian Kinerja Sasaran 1	31
Gambar 3.2	Pembangunan/Revitalisasi Pasar Rakyat	34
Gambar 3.3	Kegiatan Clean Produk dan Kemasan	35
Gambar 3.4	Grafik Perbandingan Capaian Kinerja Sasaran 2	41



BAB I PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Penilaian dan pelaporan kinerja pemerintah daerah menjadi salah satu kunci untuk menjamin penyelenggaraan pemerintahan yang demokratis, transparan, akuntabel, efisien dan efektif. Upaya ini juga selaras dengan tujuan perbaikan pelayanan publik sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah. Untuk itu, pelaksanaan otonomi daerah perlu mendapatkan dorongan yang lebih besar dari berbagai elemen masyarakat, termasuk dalam pengembangan akuntabilitas melalui penyusunan dan pelaporan kinerja pemerintah daerah.

Penyusunan Laporan Kinerja (LKj) merupakan amanat Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Penyusunan LKj dilakukan dengan berdasarkan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 tahun 2016 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Review Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, di mana pelaporan capaian kinerja organisasi secara transparan dan akuntabel merupakan bentuk pertanggungjawaban atas kinerja Dinas Perdagangan Kabupaten Bone.

Proses penyusunan LKj dilakukan pada setiap akhir tahun anggaran bagi setiap instansi untuk mengukur pencapaian target kinerja yang sudah ditetapkan dalam dokumen perjanjian kinerja. Pengukuran pencapaian target kinerja ini dilakukan dengan membandingkan antara target dan realisasi kinerja setiap instansi pemerintah, yang dalam hal ini adalah Dinas Perdagangan Kabupaten Bone. LKj menjadi dokumen laporan kinerja tahunan yang berisi pertanggung-jawaban kinerja suatu instansi dalam mencapai tujuan/sasaran strategis instansi. Disinilah esensi dari prinsip akuntabilitas sebagai pijakan bagi instansi pemerintah ditegakkan dan diwujudkan.

Mengacu kepada Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014, LKj tingkat SKPD disampaikan kepada Gubernur/Bupati/Walikota selambat-lambatnya dua bulan setelah tahun anggaran berakhir.

1.2 MAKSUD DAN TUJUAN

LKj Dinas Perdagangan Kabupaten Bone merupakan salah satu bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi pemerintah daerah selama kurun waktu 1 (satu) tahun secara sistematis dalam mencapai tujuan/sasaran strategis instansi. Penyusunan LKj juga menjadi alat kendali untuk mendorong peningkatan kinerja setiap unit organisasi.

LKj Dinas Perdagangan Kabupaten Bone merupakan proses untuk menilai pencapaian setiap indikator kinerja guna memberikan gambaran tentang keberhasilan dan kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran yang selanjutnya dianalisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternative solusi yang telah dilakukan. Identifikasi keberhasilan, permasalahan dan solusi yang tertuang dalam LKj, menjadi sumber untuk perbaikan perencanaan dan pelaksanaan program dan kegiatan yang akan datang. Dengan pendekatan ini, LKj sebagai proses evaluasi menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari perbaikan yang berkelanjutan di pemerintah untuk meningkatkan kinerja pemerintahan melalui perbaikan pelayanan publik.

1.3 GAMBARAN UMUM ORGANISASI

1.3.1 TUGAS POKOK DAN FUNGSI DINAS PERDAGANGAN KABUPATEN BONE

Pembentukan Dinas Perdagangan Kabupaten Bone tertuang dalam Peraturan Daerah Kabupaten Bone Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah dan untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi Dinas Perdagangan Kabupaten Bone diatur dalam Peraturan Bupati Bone Nomor 86 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Perdagangan Kabupaten Bone. Tugas pokok dan fungsi Dinas Perdagangan Kabupaten Bone yaitu sebagai berikut:

a. Tugas Pokok Dinas Perdagangan

Membantu Bupati dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perdagangan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada Daerah.

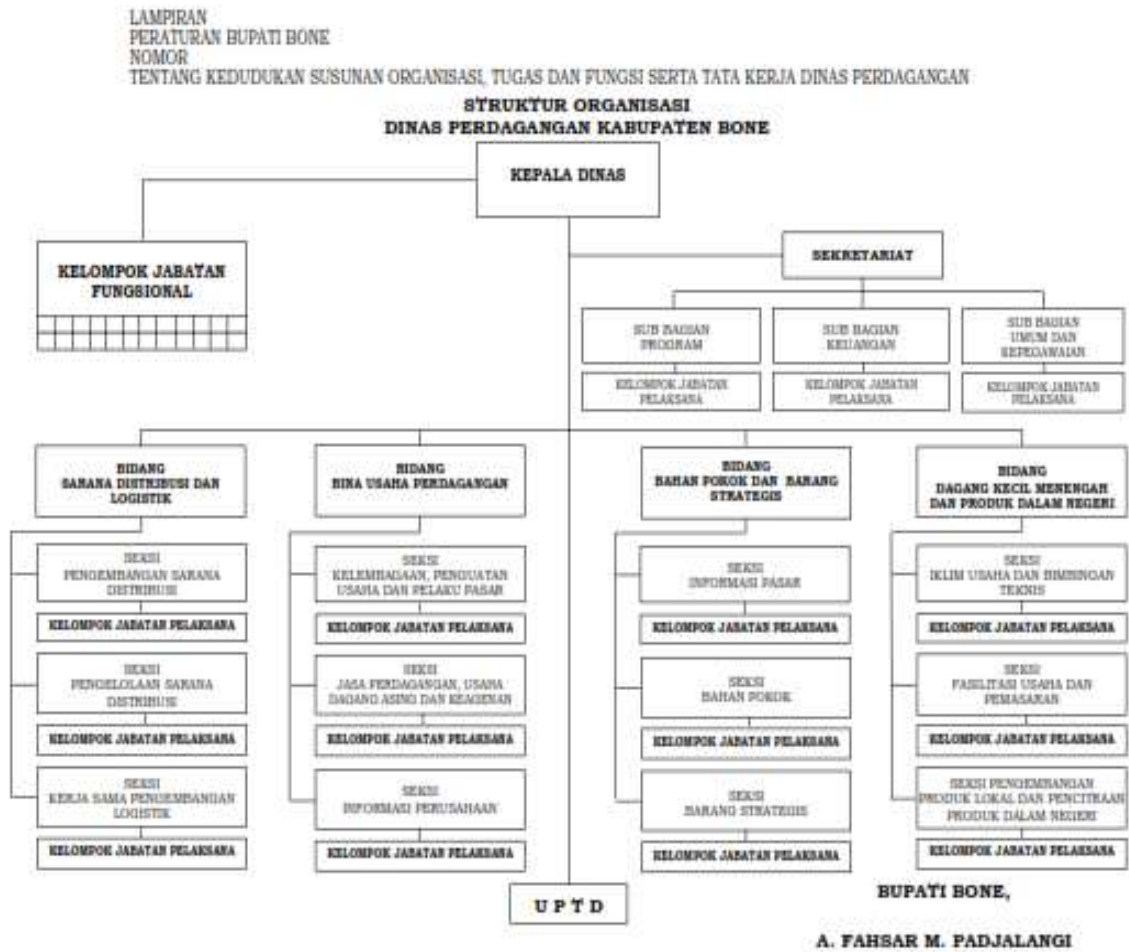
b. Fungsi Dinas Perdagangan Kabupaten Bone

1. perumusan kebijakan penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang perdagangan;
2. pelaksanaan kebijakan urusan pemerintahan bidang perdagangan;
3. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan urusan pemerintahan bidang perdagangan;
4. pelaksanaan administrasi dinas urusan pemerintahan bidang Perdagangan; dan
5. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

c. Struktur Organisasi

Dinas Perdagangan Kabupaten Bone memiliki susunan organisasi sebagai berikut

- a. Kepala Dinas;
- b. Sekretariat terdiri atas :
 - 1. Sub Bagian Kepegawaian;
 - 2. Sub Bagian Program;
 - 3. Sub Bagian Umum dan Keuangan;
- c. bidang pengembangan sarana distribusi dan logistik terdiri dari :
 - 1. Seksi Pengembangan Sarana Distribusi;
 - 2. Seksi Pengelolaan Sarana Distribusi; dan
 - 3. Seksi Kerja Sama Pengembangan Logistik .
- d. bidang bina usaha perdagangan terdiri dari :
 - 1. Seksi Kelembagaan. Penguatan Usaha dan Pelaku Pasar;
 - 2. Seksi Jasa Perdagangan, Usaha Dagang Asing dan Keagenan; dan
 - 3. Seksi Informasi Perusahaan.
- e. bidang bahan pokok dan strategis terdiri dari :
 - 1. Seksi Informasi Pasar;
 - 2. Seksi Bahan Pokok; dan
 - 3. Seksi Barang Strategis.
- f. bidang dagang kecil, menengah dan produk dalam negeri terdiri dari :
 - 1. Seksi Iklim Usaha dan Bimbingan Teknis;
 - 2. Seksi Fasilitas Usaha dan Pemasaran; dan
 - 3. Seksi Pengembangan Produk Lokal dan Penciptaan Produk dalam Negeri.
- g. UPTD
- h. kelompok jabatan pelaksana dan jabatan fungsional.



Gambar 1.1 Struktur Organisasi Dinas Perdagangan Kabupaten Bone

Jumlah pegawai yang berstatus PNS Dinas Perdagangan Kabupaten Bone sampai dengan bulan Desember 2019 adalah sebanyak 15 orang dan 25 Orang Staf Tenaga Kontrak/Honorar, dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 1.1:
Komposisi Pegawai Dinas Perdagangan Kabupaten Bone berdasarkan Jenis Kelamin

No	Jenis Kelamin	Jumlah	Keterangan
1	Laki-Laki	8	
2	Perempuan	7	
Jumlah		15	

Sumber : Disdag tahun 2019



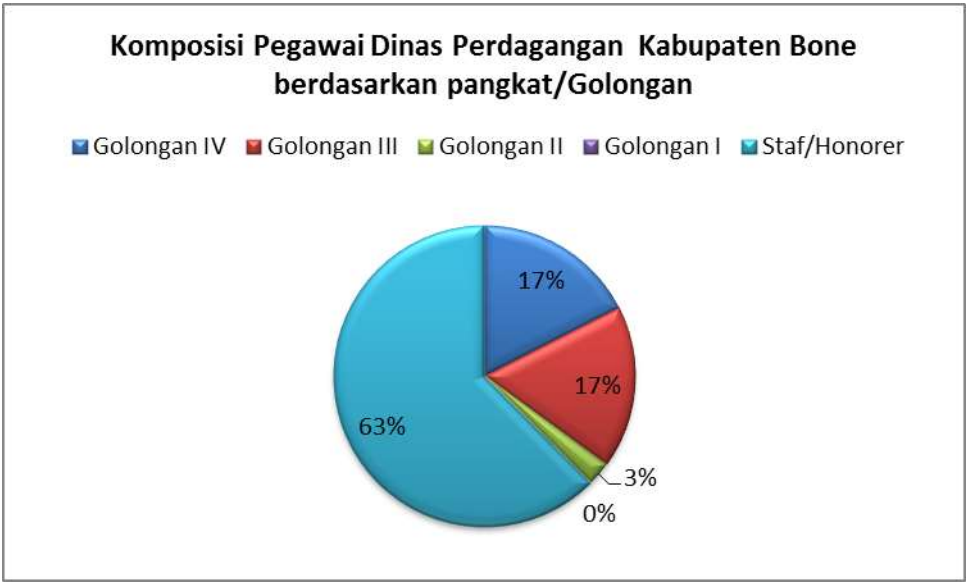
Gambar 1.2 Komposisi Pegawai Dinas Perdagangan Kabupaten Bone berdasarkan Jenis Kelamin

Tabel 1.2

Komposisi Pegawai Dinas Perdagangan Kabupaten Bone berdasarkan pangkat/Golongan

No	Pangkat/Golongan	Jumlah	Keterangan
1	Golongan IV	7 orang	
2	Golongan III	7 orang	
3	Golongan II	1 orang	
4	Golongan I	0 orang	
5	Staf/Honorer	25 Orang	
Jumlah		40 orang	

Sumber :Daftar Hadir Dinas Perdagangan 2019



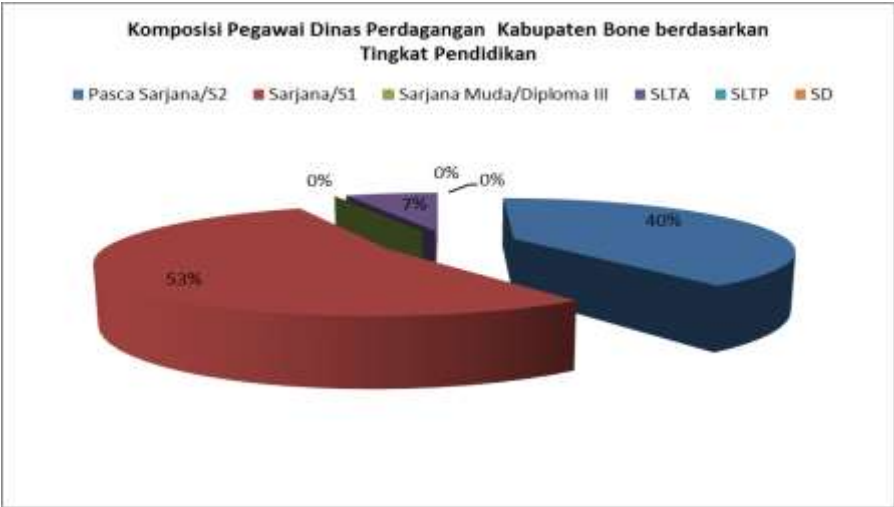
Gambar 1.3 Komposisi Pegawai Dinas Perdagangan Kabupaten Bone berdasarkan pangkat/Golongan

Komposisi tingkat pendidikan pegawai Dinas Perdagangan dapat di lihat pada table 1.3 .

Tabel 1.3:
Komposisi Pegawai Dinas Perdagangan Kabupaten Bone berdasarkan Tingkat Pendidikan

No	Pangkat/Golongan	Jumlah	Keterangan
1	Pasca Sarjana/S2	6 orang	
2	Sarjana/S1	8 orang	
3	Sarjana Muda/Diploma III	0 orang	
4	SLTA	1 orang	
5	SLTP	0 orang	
6	SD	0 orang	
Jumlah		15 orang	

Sumber : Disdag Laporan tahun 2019



Gambar 1.4 Komposisi Pegawai Dinas Perdagangan Kabupaten Bone berdasarkan Tingkat Pendidikan

Pegawai/Aparatur Pemerintah merupakan nukleus organisasi yang menempati posisi strategis dan peran dominan dalam membawa Dinas Perdagangan untuk mencapai tujuannya. Tujuan Dinas Perdagangan hanya akan terwujud apabila didukung oleh aparatur yang andal dan professional .Demikian penting dan strategisnya peran pegawai/aparatur ini menuntut diselenggarakannya manajemen sumber daya manusia secara baik, tepat dan terarah, sehingga mereka dapat memberikan kontribusi positif bagi kemajuan danDinas Perdagangan.Tanpa itu semua pegawai justru dapat menjadi sumber penyebab terjadinya pemborosan dan inefisiensi, dan sangat sulit untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan.

1.4 ISU STRATEGIS

Isu Strategis yang dihadapi Dinas Perdagangan Kabupaten Bone yang dituangkan dalam Rencana Kerja (RENJA) Tahun 2019 disusun berdasarkan isu strategis dari permasalahan - permasalahan program yang ditemukan dalam penyelenggaraan kegiatan – kegiatan pembangunan di lapangan. Untuk menentukan isu strategis secara benar dan akurat maka beberapa fakta - fakta kegiatan penting dalam pembangunan sektor Perdagangan dapat dikemukakan sebagai berikut :

- a. Kurangnya sarana dan prasarana dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi
- b. Anggaran yang terbatas
- c. Kurangnya jumlah SDM dibandingkan dengan Perdagangan yang dibina
- d. Rendahnya kontribusi Perdagangan dalam PDRB
- e. Rendahnya akses dan jaringan pasar
- f. Masih kurang networkning dalam pembinaan
- g. Masih kurangnya permodalan dan infrastruktur pendukung usaha
- h. Masih kurangnya cakupan dan volume pembinaan pada UDKM
- i. Rendahnya minat masyarakat untuk menjadi wirasusahawan

1.5 INOVASI PELAYANAN PUBLIK

Inovasi menjadi kunci dalam reformasi birokrasi dan perbaikan kinerja pelayanan publik, oleh karena itu berbagai inovasi juga telah dikembangkan oleh Dinas Perdagangan Kabupaten Bone. Salah satu inovasi yang dikembangkan adalah Pusat Pelayanan dan Pengembangan UKM dengan Moto “UKM MAU MAJU AYO KE KLINIK UKM “. Pusat Pelayanan dan Pengembangan ini di buat dengan tujuan meningkatkan pengetahuan UKM dalam mengembangkan Usahanya.

Pusat Pelayanan dan Pengembangan UKM ini berkantor di Dinas Perdagangan Kabupaten Bone. Kegiatan yang dilakukan adalah :

1. Memfasilitasi UKM untuk mengusulkan bantuan Modal Usaha Kecil dan Menengah pada Bank atau Koperasi.
2. Memfasilitasi UKM dalam membuat administrasi usahanya
3. Memfasilitasi UKM yang ingin melakukan perbaikan Kemasan
4. Memfasilitasi UKM dalam mempromosikan Produk yang di Hasilkan
5. Membuka Konsultasi UKM terkait pengembangan Usahanya .



Gambar 1.5 Kegiatan Pelayanan dan Pengembangan UKM



BAB II PERENCANAAN KINERJA

Dalam rangka pelaporan keuangan dan kinerja Instansi Pemerintah sebagaimana amanat Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, maka terbitlah Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP).

SAKIP adalah rangkaian sistematis dari berbagai aktivitas, alat, prosedur yang dirancang untuk tujuan penetapan dan pengukuran, pengumpulan data, pengklasifikasian, pengikhtisaran, dan pelaporan kinerja pada instansi pemerintah, dalam rangka pertanggungjawaban dan peningkatan kinerja instansi pemerintah. Penyelenggaraan SAKIP dilaksanakan untuk penyusunan Laporan Kinerja yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Penyelenggaraan SAKIP dilaksanakan secara selaras dan sesuai dengan penyelenggaraan Sistem Akuntansi Pemerintahan dan tata cara pengendalian serta evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan.



Gambar 2.1
Komponen Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP)

2.1 RENCANA STRATEGIS

Rencana Strategis (Renstra) Dinas Perdagangan Kabupaten Bone Tahun 2018-2023 merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Bone 2018-2023. Rencana Strategis (RENSTRA) sebagai dokumen perencanaan yang memuat penjabaran visi, misi, tujuan, sasaran dan program SKPD selama 5 tahun yang berpedoman kepada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD).

2.1.1 VISI dan MISI BUPATI DAN WAKIL BUPATI

Visi Bupati dan Wakil Bupati Bone 2018-2023 adalah

Visi :

“Masyarakat Bone yang Mandiri, Berdaya Saing dan Sejahtera”

Rumusan visi di atas mencakup tiga pokok visi yakni “Masyarakat Bone yang Religius”, “Masyarakat Bone yang Berdaya Saing”, dan “Masyarakat Bone yang Sejahtera”. Makna dari ketiga pokok visi tersebut adalah sebagai berikut:

1. Masyarakat Bone yang Mandiri, dapat dimaknakan sebagai kemampuan nyata pemerintah daerah dan masyarakatnya dalam mengatur dan mengurus kepentingan daerah/rumah tangganya sendiri menurut prakarsa dan aspirasi masyarakatnya, termasuk didalamnya upaya yang sungguh-sungguh secara bertahap mampu mengurangi ketergantungan terhadap pihak-pihak lain namun tetap melakukan kerjasamadengan daerah-daerah lain yang saling menguntungkan.
2. Masyarakat Bone yang Berdaya Saing, dapat diartikan sebagai terwujudnya kemampuan masyarakat Kabupaten Bone untuk memanfaatkan keunggulan inovasi, komparatif, dan kompetitif yang berbasis sumberdaya lokal dengan tetap memperhatikan kelestarian lingkungan sehingga mampu bersaing secara regional, nasional, bahkan internasional.
3. Masyarakat Bone yang Sejahtera, mengandung makna semakin meningkatnya kualitas kehidupan masyarakat dalam memenuhi kebutuhan dasar yang berkelanjutan dalam aspek ekonomi, pendidikan, kesehatan, politik, sosial budaya, lingkungan hidup yang dilingkupi dengan suasana kehidupan yang religius, aman dan kondusif serta didukung oleh infrastruktur dan tata kelola pemerintahan yang baik.

Misi di dalam dokumen RPJMD ini diartikan sebagai upaya umum untuk mewujudkan visi. Setiap rumusan misi ini memiliki keterkaitan dengan pokok visi tertentu yang didukung pencapaiannya. Selain itu, rumusan misi ini juga berfungsi

sebagai dasar dalam merumuskan tujuan dan sasaran yang ingin dicapai dalam perspektif lima tahun ke depan.

Dengan pemahaman tentang misi yang demikian dan berdasarkan pokok-pokok visi yang tercakup dalam rumusan visi, maka misi beserta penjelasan misi RPJMD Kabupaten Bone 2018-2023 adalah sebagai berikut:

1. Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih dan bebas Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN).
2. Mengembangkan kemandirian ekonomi dan meningkatkan taraf hidup masyarakat.
3. Meningkatkan akses, pemerataan, dan kualitas pelayanan kesehatan, pendidikan, dan sosial dasar lainnya.
4. Mengoptimalkan akselerasi pembangunan daerah berbasis desa dan kawasan perdesaan.
5. Mendorong penciptaan iklim investasi yang kondusif untuk pengembangan usaha dan mengembangkan inovasi daerah dalam peningkatan pelayanan publik.
6. Meningkatkan budaya politik, penegakan hukum, dan seni budaya dalam kemajemukan masyarakat.

Adapun Misi Kabupaten Bone Tahun 2018-2023 yang berkorelasi langsung dengan Dinas perdagangan Kabupaten Bone adalah sebagai berikut :

- a. Misi 1 : Mengembangkan kemandirian ekonomi dan meningkatkan taraf hidup masyarakat.
- b. Misi 2 : Mengembangkan kemandirian ekonomi dan meningkatkan taraf hidup masyarakat.

Pencapaian Misi ini diwujudkan oleh Dinas Perdagangan menjadi Tujuan dan Sasaran di Renstra Dinas Perdagangan Tahun 2018-2023

2.1.2 TUJUAN DAN INDIKATOR KINERJA

Tujuan merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan misi, yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 (satu) sampai 5 (lima) tahun. Penetapan tujuan dalam Rencana Strategis (Renstra) didasarkan pada potensi dan permasalahan serta isu utama bidang Dinas Perdagangan Kabupaten Bone.

- Tujuan : 1. Meningkatkan Kinerja Perekonomian Daerah dari Sektor Perdagangan
2. Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah
- Sasaran : 1. Meningkatnya Pertumbuhan Ekonomi dari sektor Perdagangan
2. Meningkatnya Perlindungan Konsumen
3. Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Urusan Perdagangan

Indikator kinerja dan target kinerja untuk tujuan strategis diuraikan dalam tabel berikut ini:

Tabel 2.1
Tujuan dan Indikator Kinerja Dinas Perdagangan

NO	TUJUAN	INDIKATOR KINERJA	BASELINE 2017	TARGET AKHIR RENSTRA 2023
1	Meningkatkan Kinerja Perekonomian Daerah dari Sektor Perdagangan	Kontribusi sektor Perdagangan terhadap PDRB	11.53	12.74
		Persentase Pasar dalam Kondisi baik	35%	75%
		Persentase Potensi Komodity Unggulan Kabupaten yang terpublikasi	70%	100%
		Cakupan bina kelompok pedagang/usaha informal %)	5.45	6,14
		Persentase Alat UTTP yang Lolos Uji Tera Ulang	100%	100%
		Persentase Laporan Konsumen yang diTindak Lanjuti	100%	100%
2	Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Predikat Evaluasi SAKIP oleh APIP	Belum Ada	BB

2.1.3 SASARAN DAN INDIKATOR KINERJA

Mengacu kepada tujuan yang telah ditetapkan, maka sasaran yang hendak dicapai atau dihasilkan adalah sebagai berikut:

- Tujuan 1 : Meningkatkan Kinerja Perekonomian Daerah dari Sektor Perdagangan
- Sasaran : 1. Meningkatnya Pertumbuhan Ekonomi dari sektor Perdagangan
2. Meningkatnya Perlindungan Konsumen
3. Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Urusan Perdagangan
- Tujuan 2 : Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Urusan Perdagangan
- Sasaran : 1. Predikat Evaluasi SAKIP oleh APIP

Tabel 2.2
Sasaran dan Indikator Kinerja Dinas Perdagangan

NO	SASARAN	INDIKATOR	BASELINE 2017	TARGET AKHIR RENSTRA 2023
1	Meningkatnya Pertumbuhan Ekonomi dari sektor Perdagangan	Kontribusi sektor Perdagangan terhadap PDRB	11.53	12.74
		Persentase Pasar dalam Kondisi baik	35%	75%
		Persentase Potensi Komodity Unggulan Kabupaten yang terpublikasi	70%	100%
		Cakupan bina kelompok pedagang/usaha informal %)	5.45	6.14
	Meningkatnya Perlindungan Konsumen	Persentase Alat UTP yang Lolos Uji Tera Ulang	100%	100%
		Persentase Laporan Konsumen yang diTindak Lanjuti	100%	100%
2	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Urusan Perdagangan	Predikat Evaluasi SAKIP oleh APIP	Belum Ada	BB

2. 1.4 PROGRAM UNTUK PENCAPAIAN SASARAN

Berdasarkan visi, misi, tujuan, dan sasaran yang telah ditetapkan dalam RENSTRA, maka upaya pencapaiannya kemudian dijabarkan secara lebih sistematis melalui perumusan program-program. Adapun program-program untuk mendukung masing-masing sasaran tahun 2019 sebagai berikut:

Tabel 2.3 Program Untuk Pencapaian Sasaran Tahun 2019

SASARAN	PROGRAM PENDUKUNG
Meningkatnya Pertumbuhan Ekonomi dari sektor Perdagangan	1. Program Peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam Negeri
	2. Program Pemberdayaan Usaha Dagang Kecil dan Menengah
	3. Program Peningkatan dan Pengembangan Ekspor
	4. Program Pembinaan Pedagang Kaki Lima Dan Asongan
Meningkatnya Perlindungan Konsumen	1. Program Perlindungan Konsumen Dan Pengamanan Perdagangan
Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Urusan Perdagangan	1. Program Pelayanan Administrasi Perkatoran
	2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
	3. Program Peningkatan Disiplin Aparatur
	4. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
	5. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
	6. Program Penunjang Pemerintahan Umum

2.2 PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2019

Perjanjian Kinerja (PK) merupakan dokumen pernyataan/kesepakatan antara atasan dan bawahan untuk mencapai target kinerja yang ditetapkan satu instansi. Dokumen ini memuat sasaran strategis, indikator kinerja dan target kinerja beserta program dan anggaran. Penyusunan PK 2019 dilakukan dengan mengacu kepada RENSTRA, RENCANA KERJA (RENJA) 2019, IKU dan APBD. Dinas Perdagangan Kabupaten Bone telah menetapkan PK sebagai berikut:

Tabel 2.4 Perjanjian Kinerja Dinas Perdagangan Tahun 2019

NO	SASARAN	INDIKATOR	TARGET 2019
1	Meningkatnya Pertumbuhan Ekonomi dari sektor Perdagangan	Kontribusi sektor Perdagangan terhadap PDRB	11.77
		Persentase Pasar dalam Kondisi baik	50%
		Persentase Potensi Komodity Unggulan Kabupaten yang terpublikasi	80%
		Cakupan bina kelompok pedagang/usaha informal %)	5.67
	Meningkatnya Perlindungan Konsumen	Persentase Alat UTTP yang Lolos Uji Tera Ulang	100%
		Persentase Laporan Konsumen yang diTindak Lanjuti	100%
2	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Urusan Perdagangan	Predikat Evaluasi SAKIP oleh APIP	CC

2.3 INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)

Indikator Kinerja Utama (IKU) merupakan ukuran keberhasilan organisasi dalam mencapai tujuan dan merupakan ikhtisar hasil berbagai Program dan Kegiatan sebagai penjabaran tugas dan fungsi organisasi. Pada Tahun 2019 telah ditetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU) berdasarkan Peraturan Bupati Bone Nomor 87 Tahun 2018 Tentang Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kabupten Bone, tanggal 13 November 2018 sebagai berikut:

Tabel 2.5 IKU Dinas Perdagangan

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	PENJELASAN/FORMULASI PERHITUNGAN CAPAIAN TARGET KINERJA		SUMBER DATA	PENANGGUNG JAWAB
1	Meningkatnya Pertumbuhan Ekonomi dari sektor Perdagangan	Kontribusi sektor Perdagangan terhadap PDRB	Jumlah Kotribusi PDRB dari Sektor Perdagangan	x100%	BPS	BIDANG PENGEMBANGAN SARANA DISTRIBUSI DAN LOGISTIK
			Jumlah total PDRB			
		Persentase Pasar dalam Kondisi baik	Jumlah Pasar dalam Kondisi Baik	x100%	BIDANG PENGEMBANGAN SARANA DISTRIBUSI DAN LOGISTIK	
			Jumlah Seluruh Pasar			
		Persentase Potensi Komodity Unggulan Kabupaten yang terpublikasi	Jumlah Potensi Komodity Unggulan yang terpublikasi	x100%	BIDANG BINA USAHA PERDAGANGAN	BIDANG BINA USAHA PERDAGANGAN
			Jumlah Keseluruhan Komodity Unggulan			
		Cakupan bina kelompok pedagang/usaha informal %)	Jumlah Kelompok Pedagang/Usaha informal yang dibina	x100%	BIDANG DAGANG KECIL, MENENGAH DAN PRODUK DALAM NEGERI	BIDANG DAGANG KECIL, MENENGAH DAN PRODUK DALAM NEGERI
			Jumlah Kelompok Pedagang/Usaha informal			
2	Meningkatnya Perlindungan Konsumen	Persentase Alat UTTP yang Lolos Uji Tera Ulang	Jumlah Alat UTTP yang Lolos Uji Tera Ulang	x100%	BIDANG BAHAN POKOK DAN STRATEGIS	BIDANG BAHAN POKOK DAN STRATEGIS
			Jumlah Alat UTTP yang Tera Ulang			
		Persentase Laporan Konsumen yang diTindak Lanjuti	Jumlah Laporan Konsumen yang di Tindak Lanjuti	x100%		
			Jumlah Laporan Konsumen			

2.4 RENCANA ANGGARAN TAHUN 2019

Berdasarkan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Dinas Perdagangan Kabupaten Bone. maka jumlah pendanaan yang dimungkinkan untuk dibelanjakan pada Tahun Anggaran 2019 adalah sebesar Rp **9.459.780.437,00** yang digunakan untuk membiayai Belanja Tidak Langsung dan Belanja Langsung. Secara rinci rencana anggaran Belanja Tidak Langsung dan Belanja Langsung dapat dilihat pada tabel di bawah ini

Tabel 2.6 Rencana Belanja Dinas Perdagangan Kabupaten Bone
TA 2019

No	Uraian	Rencana (Rp)	%
1	Belanja Tidak Langsung	1.900.739.477,00	20.09
2	Belanja Langsung	7.559.040.960,00	79.91
Jumlah		9.459.780.437,00	100

Alokasi anggaran belanja langsung tahun 2019 yang dialokasikan untuk membiayai program-program yang langsung mendukung pencapaian sasaran pembangunan adalah sebagai berikut :

Tabel 2.7 Alokasi per Sasaran Tahun Anggaran 2019

TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	PROGRAM	KEGIATAN	Anggaran	Realisasi	Persentase Anggaran	
Meningkatkan Kinerja Perekonomian Daerah dari Sektor Perdagangan	Meningkatnya Pertumbuhan Ekonomi dari sektor Perdagangan	Kontribusi sektor Perdagangan terhadap PDRB	Program Peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam Negri	Kegiatan Fasilitasi Ke mudahan Perijinan Pe ngembangan Usaha	Rp 20,000,000.00	Rp 20,000,000.00	100.0%	
				· Kegiatan Pengembang an Pasar Lelang Daerah	Rp 16,000,000.00	Rp 15,950,000.00	99.7%	
				· Kegiatan Fasilitasi Pasar Murah	Rp 116,820,000.00	Rp 116,820,000.00	100.0%	
		Persentase Pasar dalam Kondisi baik		· Kegiatan Pengembang an Sarana dan Prasara na Perdagangan	Rp 4,795,496,000.00	Rp 4,714,607,533.51	98.3%	
				· Kegiatan Operasiona lisasi Sistem Resi Gudang	Rp 72,098,500.00	Rp 69,788,000.00	96.8%	
				· Kegiatan Bimbingan Teknis Pengelola Pasar dan Pergudangan	Rp 57,310,000.00	Rp 57,226,000.00	99.9%	
		Persentase Potensi Komodity Unggulan Kabupaten yang terpublikasi	Program Peningkatan dan Pengembangan Ekspor	-Sosialisasi Kebijakan Penyederhanaan Prosedur dan Dokumen Ekspor dan Impor	Rp 13,366,000.00	Rp 13,366,000.00	100.0%	
					-Pengembangan database informasi potensi unggulan	Rp 13,010,000.00	Rp 12,760,000.00	98.1%
					-Promosi Produk Daerah	Rp 130,250,000.00	Rp 124,250,000.00	95.4%
		Cakupan bina kelompok pedagang/usaha informal %)	Program Pembinaan Pedagang Kaki Lima dan Asongan	-Penyuluhan Peningkatan Disiplin Pedagang Kaki Lima dan Asongan	Rp 10,347,000.00	Rp 10,347,000.00	100.0%	
		Program Pemberdayaan Usaha Dagang Kecil dan Menengah	Pembinaan Peningkatan Promosi Produk UDKM	Rp 10,750,000.00	Rp 10,750,000.00	100.0%		
			Pelatihan Clean Produk dan Kemasan UDKM	Rp 10,000,000.00	Rp 10,000,000.00	100.0%		
	Meningkatnya Perlindungan Konsumen	Persentase Alat UTP yang Lolos Uji Tera Ulang	Program Perlindungan Konsumen dan Penganamanan Perdagangan	-Operasionalisasi dan Pengembangan UPT Kentrologian Daerah	Rp 12,500,000.00	Rp 12,500,000.00	100.0%	
				-Peningkatan Pengawasan Peredaran Barang dan Jasa	Rp 65,750,000.00	Rp 65,741,666.00	100.0%	
				-Monitoring Bahan Kebutuhan Pokok	Rp 29,326,000.00	Rp 29,326,000.00	100.0%	
				Penanganan Pengaduan Konsumen	Rp 7,000,000.00	Rp 7,000,000.00	100.0%	
		Persentase Laporan Konsumen yang diTindak Lanjuti						

Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Urusan Perdagangan	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Urusan Perdagangan	Nilai SAKIP oleh APIP	Program Penunjang Pemerintahan Umum	Penyusunan Rencana Perangkat Daerah	Rp 42,000,000.00	Rp 30,648,800.00	73.0%
			Program Peningkatan Pengembangan Sistem Laporan Capaian Kinerja dan Keuangan	'Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Iktisar Realisasi Kinerja SKPD	Rp 36,200,000.00	Rp 29,825,950.00	82.4%
				'Monitoring dan Evaluasi Capaian Kinerja dan Keuangan	Rp 29,900,000.00	Rp 29,899,828.00	100.0%
			Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan	Rp 34,690,000.00	Rp 34,690,000.00	100.0%
			Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional	Rp 600,000,000.00	Rp 595,144,000.00	99.2%
				Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	Rp 669,500,000.00	Rp -	0.0%
				Pengadaan Mabeleur	Rp 8,600,000.00	Rp -	0.0%
				Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Rp 18,106,000.00	Rp 15,979,000.00	88.3%
				Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas Operasional	Rp 63,800,000.00	Rp 54,227,400.00	85.0%
			Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Rp 25,800,000.00	Rp 23,913,439.00	92.7%
				Penyedia Jasa Administrasi Keuangan	Rp 101,001,600.00	Rp 88,356,567.60	87.5%
				Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Rp 7,498,000.00	Rp 6,198,000.00	82.7%
				Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Rp 2,605,000.00	Rp 2,560,000.00	98.3%
				Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Rp 37,500,000.00	Rp 36,280,000.00	96.7%
				Rapat-rapat koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah dan Luar Daerah	Rp 386,248,110.00	Rp 385,775,585.00	99.9%
				Pelaksanaan Administrasi Perkantoran	Rp 115,568,750.00	Rp 110,507,400.00	95.6%
				Total	Rp 7,559,040,960.00	Rp 6,734,438,169.11	89.09%

Pada tabel di atas, jumlah anggaran untuk program/kegiatan sebesar Rp.7.559.040.960.00 dengan prosentase terbesar anggaran untuk mendukung Indikator Persentase Pasar dalam Kondisi baik dengan besaran 65.15 %. Sementara itu, Indikator dengan anggaran yang relatif kecil adalah Indikator Cakupan bina kelompok pedagang/usaha informal sebesar 0.41 % dari total anggaran belanja langsung



BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

Akuntabilitas kinerja adalah kewajiban untuk menjawab dari perorangan, badan hukum atau pimpinan kolektif secara transparan mengenai keberhasilan atau kegagalan dalam melaksanakan misi organisasi kepada pihak-pihak yang berwenang menerima pelaporan akuntabilitas.

Pengukuran kinerja digunakan sebagai dasar untuk penelitian keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan sasaran dan tujuan Dinas Perdagangan Kabupaten Bone. Pengukuran yang dimaksud itu merupakan suatu hasil dari suatu penilaian yang sistematis dan didasarkan pada kelompok Indikator Kinerja Kegiatan berupa masukan, keluaran, hasil, manfaat dan dampak.

Penilaian dimaksud tidak terlepas dari kegiatan mengolah masukan menjadi keluaran dan penilaian dalam proses penyusunan/kegiatan yang dianggap penting dan berpengaruh terhadap pencapaian sasaran tujuan.

3.1 CAPAIAN KINERJA ORGANISASI

Untuk mempermudah interpretasi atas pencapaian sasaran dan indikator kinerja sasaran digunakan skala pengukuran ordinal dengan pendekatan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, sebagai berikut :

Tabel 3.1. Skala Pengukuran Ordinal

NO	INTERVAL NILAI REALISASI KINERJA	KRITERIA PENILAIAN REALISASI KINERJA
1	> 100 %	Baik Sekali
2	76 % ≤ 100 %	Baik
3	66 % ≤ 75 %	Cukup
4	51 % ≤ 65 %	Kurang
5	≤ 50%	Sangat Kurang

Secara umum Dinas Perdagangan Kabupaten Bone telah dapat melaksanakan tugas dalam rangka mencapai sasaran dan indikator yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis (Renstra) Dinas Perdagangan Kabupaten Bone Tahun 2018-2023. Dalam Renstra terdapat 3 (tiga) sasaran dengan 7 (tujuh) indikator sasaran.

Tabel 3.2
Pencapaian Indikator Sasaran

No	Sasaran	Jumlah Indikator	Pencapaian Indikator Sasaran
1.	Meningkatnya aktivitas perdagangan dalam dan luar negeri	4	BS = 2 B = 2 SK = C = K =
2	Meningkatnya Perlindungan Konsumen	2	BS = 0 B = 2 SK =
			C = K = 0
3	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Urusan Perdagangan	1	BS = 1 B = 0 SK =
			C = 0 K = 0
	JUMLAH	7	BS = 3 B = 4 SK =

3.1.1 CAPAIAN INDIKATOR KINERJA TAHUN 2019

Berdasarkan Perjanjian Kinerja Tahun 2019 yang ditetapkan diawal tahun, pencapaian masing-masing indikator kinerja sasaran dapat dilihat berdasarkan tabel capaian kinerja dibawah:

Tabel 3.3 Capaian Kinerja Dinas Perdagangan
Kabupaten Bone Tahun 2019

NO	SASARAN	INDIKATOR	TARGET 2019	REALISASI 2019	CAPAIAN %
1	Meningkatnya Pertumbuhan Ekonomi dari sektor Perdagangan	Kontribusi sektor Perdagangan terhadap PDRB	11,77	12,11	103%
		Persentase Pasar dalam Kondisi baik	50%	46,34%	93%
		Persentase Potensi Komoditi Unggulan Kabupaten yang terpublikasi	80%	80%	100%
		Cakupan bina kelompok pedagang/usaha informal (%)	5,67	6,86	121%
2	Meningkatnya Perlindungan Konsumen	Persentase Alat UTTP yang Lolos Uji Tera Ulang	100%	100%	100%
		Persentase Laporan Konsumen yang diTindak Lanjuti	100%	100%	100%
3	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Urusan Perdagangan	Predikat Evaluasi SAKIP oleh APIP	CC	B	114%

Dari 7 (tujuh) yang menjadi indikator kinerja Dinas Perdagangan, dapat dijelaskan bahwa pencapaian indikator sasaran kinerja Dinas Perdagangan Kabupaten Bone dalam skala pengukuran ordinal, diketahui bahwa terdapat 3 (tiga) indikator dengan capaian lebih dari 100% dengan pencapaian **Baik Sekali** dan 4 (empat) indikator yang kurang dari 100% dengan pencapaian **baik**.

Nilai akuntabilitas kinerja Dinas Perdagangan TA 2019 dengan target CC yang mana pengukuran Capaian Indikator kinerja nya didasarkan pada Hasil Evaluasi implementasi SAKIP Tahun 2018 yang dilaksanakan oleh Inspektorat Daerah Kab. Bone pada Tahun 2019. Sehingga yang menjadi Realisasi di Tahun 2019 adalah nilai Predikat Evaluasi Sakip oleh APIP untuk Laporan Tahun 2018.

3.1.2 CAPAIAN INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)

Indikator Kinerja Utama merupakan ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis organisasi. Pemilihan dan Penetapan Indikator Kinerja Utama harus memenuhi karakteristik yaitu spesifik, dapat dicapai, relevan, menggambarkan keberhasilan sesuatu yang diukur dan dapat dikuantifikasi dan diukur. Rincian tingkat capaian sasaran yang telah ditetapkan dengan melihat tingkat capaian kinerja masing-masing indikator kinerja diuraikan pada tabel berikut :

Tabel 3.4 Capaian Indikator Kinerja Utama Dinas Perdagangan
Kabupaten Bone Tahun 2019

NO	SASARAN	INDIKATOR	TARGET 2019	REALISASI 2019	CAPAIAN %
1	Meningkatnya Pertumbuhan Ekonomi dari sektor Perdagangan	Kontribusi sektor Perdagangan terhadap PDRB	11,77	12,11	103%
		Persentase Pasar dalam Kondisi baik	50%	46,34%	93%
		Persentase Potensi Komoditi Unggulan Kabupaten yang terpublikasi	80%	80%	100%
		Cakupan bina kelompok pedagang/usaha informal %)	5,67	6,86	121%
2	Meningkatnya Perlindungan Konsumen	Persentase Alat UTTP yang Lolos Uji Tera Ulang	100%	100%	100%
		Persentase Laporan Konsumen yang diTindak Lanjuti	100%	100%	100%

Dari dua sasaran terdapat 6 (enam) indikator kinerja utama yang dijelaskan

skala pengukuran ordinal.diketahui bahwa terdapat 2 (dua) IKU dengan Pencapaian Baik Sekali dan 4 (empat) IKU Lainnya dengan pencapaian Baik.

3.1.3 PERBANDINGAN CAPAIAN KINERJA

Pelaksanaan program/kegiatan Dinas Perdagangan Tahun 2019 sesuai dengan penetapan kinerja yang telah dilakukan, maka untuk mengevaluasi sasaran, program dan kegiatan yang telah ditetapkan dapat diketahui dengan melihat indikator-indikator yang terkait dengan sasaran, program dan kegiatan yang telah ditetapkan. Berdasarkan format Pengukuran Kinerja yang telah dibuat dengan merujuk pada Indikator Kinerja Utama dan RPJMD instansi maka capaian Pengukuran Kinerja Kegiatan Tahun 2019 dari Dinas Perdagangan dapat dijelaskan melalui uraian tiap sasaran berikut di bawah ini:

- 1. Sasaran 1: Meningkatnya Pertumbuhan Ekonomi dari sektor Perdagangan

a. Perbandingan Antara Target dan Realisasi

Tabel 3.5 Capaian Indikator Kinerja Sasaran Meningkatnya
Pertumbuhan Ekonomi dari sektor Perdagangan

N O	SASARAN	INDIKATOR IMPACT	TARGET	Realisasi	Capaian
			2019	2019	%
(1)	(3)	(4)	(6)		
1	Meningkatnya Pertumbuhan Ekonomi dari sektor Perdagangan	Kontribusi sektor Perdagangan terhadap PDRB	11.77	12.11	103%
		Persentase Pasar dalam Kondisi baik	50%	46.34%	93%
		Persentase Potensi Komodity Unggulan Kabupaten yang terpublikasi	80%	80%	100%
		Cakupan bina kelompok pedagang/usaha informal %)	5.67	6.86	121%

Berdasarkan tabel tersebut di atas dapat diketahui bahwa realisasi target pada indikator kinerja utama 1 yaitu Kontribusi sektor Perdagangan terhadap PDRB ,dengan capaian **103% telah melebihi target** yang telah ditetapkan. Realisasi pada tahun 2019 mencapai 12,11%, dari target 11,77% dengan persentase 103% Capaian ini dikategorikan **Sangat Baik**.

Berdasarkan tabel tersebut di atas dapat diketahui bahwa realisasi target pada indikator kinerja utama 2 yaitu Persentase Pasar dalam Kondisi baik, dengan capaian **93 % Kurang dari target** yang telah ditetapkan. Realisasi pada tahun 2019 mencapai 46.34 %, dari target 50 % dengan persentase 93 % Capaian ini dikategorikan **Baik**.

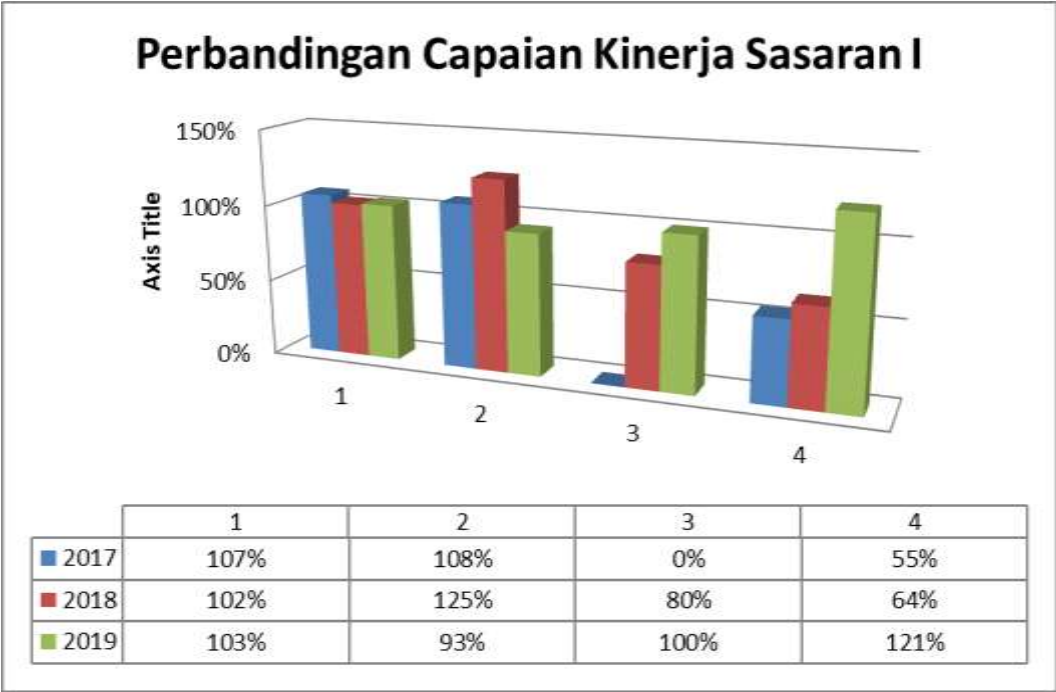
Berdasarkan tabel tersebut di atas dapat diketahui bahwa realisasi target pada indikator kinerja utama 3 yaitu Persentase Potensi Komodity Unggulan Kabupaten yang terpublikasi, dengan realisasi pada tahun 2019 mencapai 80 %, dari target 80 % dengan persentase 100 % Capaian ini dikategorikan **Baik**

Berdasarkan tabel tersebut di atas dapat diketahui bahwa realisasi target pada indikator kinerja utama 4 yaitu Cakupan Bina Kelompok Pedagang/Usaha informal, dengan capaian 6.86 % *melebihi dari target* yang telah ditetapkan sebesar 5.67 % dengan persentase 121 % Capaian ini dikategorikan **Sangat Baik**

b. Perbandingan Antara Realisasi Capaian Kinerja Dengan Tahun Sebelumnya

Tabel 3.6 Perkembangan Capaian Indikator Kinerja Sasaran 1.

INDIKATOR	BASELINE	TARGET		REALISASI			Capaian		
	2017	2018	2019	2017	2018	2019	2017	2018	2019
Kontribusi sektor Perdagangan terhadap PDRB	10,79	11,54	11,77	11,53	11,76	12,11	107%	102%	103%
Persentase Pasar dalam Kondisi baik	33%	35%	50%	35%	44%	46,34%	108%	125%	93%
Persentase Potensi Komodity Unggulan Kabupaten yang terpublikasi	Belum ada	75%	80%	Belum ada	60%	80%	0%	80%	100%
Cakupan bina kelompok pedagang/usaha informal %)	10	10,00	5,67	5,45	6,42	6,86	55%	64%	121%



Gambar 3.1 Grafik Perbandingan Capaian Kinerja Sasaran 1

Dari gambar diatas dapat diperoleh data sebagai berikut:

1. Capaian pada Indikator 1 yaitu Kontribusi sektor Perdagangan terhadap PDRB tahun 2019 mencapai 103 % dari target 100% mengalami **Peningkatan** dari tahun 2018 (tahun sebelumnya) sebesar 1 %
2. Capaian pada Indikator 2 yaitu Persentase Pasar dalam Kondisi baik tahun 2019 mencapai 93 % dari target 100% mengalami Penurunan dari tahun 2018 (tahun sebelumnya) sebesar 32 %
3. Capaian pada Indikator 3 yaitu Persentase Potensi Komodity Unggulan Kabupaten yang terpublikasi tahun 2019 mencapai 100 % dari target 100% mengalami Peningkatan dari tahun 2018 (tahun sebelumnya) sebesar 20 %
4. Capaian pada Indikator 4 yaitu Cakupan bina kelompok pedagang/usaha informal %)tahun 2019 mencapai 121 % dari target 100% mengalami peningkatan dari tahun 2018 (tahun sebelumnya) sebesar 57 %

c. Perbandingan Antara Realisasi Kinerja Dengan Periode Akhir Renstra

Tabel 3.7 Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2019 dengan Target Akhir Renstra

NO	SASARAN	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2019	CAPAIAN (%)
1	Meningkatnya Pertumbuhan Ekonomi dari sektor Perdagangan	Kontribusi sektor Perdagangan terhadap PDRB	12,74	12,11	95%
		Persentase Pasar dalam Kondisi baik	75%	46,34%	62%
		Persentase Potensi Komodity Unggulan Kabupaten yang terpublikasi	100%	80%	80%
		Cakupan bina kelompok pedagang/usaha informal %)	6,14	6,86	112%

Berdasarkan tabel diatas terdapat 3 (tiga) capaian tahun 2019 yang telah menghampiri target akhir dari renstra dan ada 1 (satu) target kinerja yang melebihi target akhir renstra dengan rincian sebagai berikut:

1. Capaian pada Indikator 1 yaitu Kontribusi sektor Perdagangan terhadap PDRB tahun 2019 mencapai 95 % dari target 100% apabila dibandingkan dengan target Akhir Renstra. Hal ini menunjukkan Realisasi capaian Tahun 2019 mendekati Target Akhir Renstra
2. Capaian pada Indikator 2 yaitu Persentase Pasar dalam Kondisi baik tahun 2019 mencapai 62 % dari target 100% apabila dibandingkan dengan target akhir renstra. Hal ini menunjukkan Realisasi Capaian Tahun 2019 menghampiri Target Akhir Renstra.
3. Capaian pada Indikator 3 yaitu Persentase Potensi Komodity Unggulan Kabupaten yang terpublikasi tahun 2019 mencapai 80 % dari target 100% apabila dibandingkan dengan target akhir renstra. Hal ini menunjukkan Realisasi Capaian Tahun 2019 menghampiri Target Akhir Renstra.
4. Capaian pada Indikator 4 yaitu Cakupan bina kelompok pedagang/usaha informal %) tahun 2019 mencapai 112 % dari target

100% apabila dibandingkan dengan target akhir renstra. Hal ini menunjukkan Realisasi Capaian Tahun 2019 melebihi Target Akhir Renstra.

d. Analisis Penyebab Keberhasilan / Kegagalan atau Peningkatan / Penurunan Kinerja

1. Kontribusi sektor Perdagangan terhadap PDRB

Kontribusi Sektor Perdagangan terhadap PDRB Tahun 2019 telah melebihi target yaitu dari 11.77 % menjadi 12.11 % namun apabila dibandingkan dengan capaian Kinerja tahun 2018 sebesar 102% dan Capaian Kinerja Tahun 2019 sebesar 103 % hal ini sebabkan karena

- a) perdagangan online yang semakin berkembang yang dapat meningkatkan penghasilan masyarakat Kabupaten Bone
- b) Semakin baiknya peredaran Barang dan Jasa yang ada Dikabupaten Bone.
- c) Mulai meningkatnya Investasi di Kabupaten Bone

2. Persentase Pasar dalam Kondisi baik

Pembangunan Pasar Daerah Dinas Perdagangan tahun 2019 dilaksanakan dengan Program Peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam Negeri pada Kegiatan Pengembangan Sarana dan Prasarana Perdagangan. Kegiatan Pengembangan Sarana dan Prasarana Perdagangan pada Program Peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam Negeri ditandai dengan terlaksananya Pembangunan/ Renovasi Pasar . Pembangunan Pasar ini dilaksanakan dengan menggunakan Dana Alokasi Khusus (DAK) untuk Kegiatan Konstruksi dan Dana Alokasi Umum (DAU) untuk dana penunjang lainnya serta didukung oleh dana Tugas Pembantuan (TP) Kementerian Perdagangan RI. Pasar yang diharapkan, yaitu pasar yang representatif, bersih dan nyaman.

Jumlah Pasar yang ada di Kabupaten bone adalah sebanyak 82 Unit Pasar yang tersebar di 27 Kecamatan. Pada Tahun 2018 Jumlah pasar dalam kondisi baik sebanyak 35 Unit Pasar . Pada Tahun 2019 Pembangunan/ Revitalisasi Pasar Rakyat yang dilaksanakan sebanyak 3 Unit Yaitu 3 Pasar yaitu Pasar USA Kecamatan Palakka, Pasar Congko Kecamatan Barebbo, dan Pasar Pallime Kecamatan Cenrana menggunakan dana DAU-DAK sebesar Rp. 4.714.607.533.51

Dengan demikian pada Tahun 2019 Jumlah Pasar dalam Kondisi Baik adalah sebanyak 38 Unit Pasar atau sebesar 46.34 % dari Jumlah Pasar

yang ada di Kabupaten Bone. Dengan capaian Kinerja sebesar 93% dibandingkan dengan capaian Kinerja tahun 2018 sebesar 125% maka mengalami penurunan hal ini disebabkan karena Jumlah Pasar yang diusulkan melalui dana DAK adalah sebanyak 5 Pasar namun hanya dialokasikan sebanyak 3 Pasar.



Gambar 3.2 Pembangunan/Revitalisasi Pasar Rakyat

3. Persentase Potensi Komodity Unggulan Kabupaten yang terpublikasi
Jumlah Komodity Unggulan yang ada di Kabupaten Bone adalah sebanyak 10 Jenis Komodity yang tersebar di 27 Kecamatan namun pada Tahun 2018 hanya 8 Jenis Komodity sehingga capaiannya 80%
4. cakupan Bina Kelompok Pedagang/ Usaha Informal (%)
Dalam hal cakupan Bina Kelompok Pedagang/ Usaha Informal (%) dapat dilihat dari jumlah perusahaan sebanyak 1.895 Unit perusahaan dengan Jumlah Perusahaan binaan sebanyak 130 Unit dengan Persentase sebesar 6.86 %. Sehingga dapat di ketahui persentase capaian kinerja sebesar 6.86% dengan target sebesar 5.67 %. Atau dengan capaian kinerja sebesar 121 %



Gambar 3.3 Kegiatan Clean Produk dan Kemasan

a. Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Bagian yang disajikan dalam tabel ini terkait dengan efisiensi anggaran untuk sasaran yang pencapaian kinerjanya mencapai atau lebih dari 100%. Terlihat bahwa mayoritas dari satu indikator, menunjukkan pencapaian yang sama atau lebih dari 100%, , sebagaimana ditunjukkan dalam tabel di bawah ini. Sebagai contoh, untuk indikator 4 cakupan Bina Kelompok Pedagang/ Usaha Informal (%), telah mencapai kinerja sebanyak 121% namun dengan realisasi anggaran hanya sebanyak 0.41 % dari total anggaran yang dialokasikan pada Dinas Perdagangan Kabupaten Bone. Banyaknya sasaran yang berhasil dicapai dengan sumber daya yang efisien menunjukkan bahwa efisiensi anggaran telah mencapai tingkat yang tinggi ataupun sangat tinggi. Kondisi ini sejalan dengan prinsip pengelolaan anggaran publik dan lebih jauh, juga sejalan dengan prinsip pemerintahan yang baik, yang salah satunya adalah pengelolaan sumber daya anggaran yang efisien dalam mencapai tujuan dan sasaran pembangunan.

Tabel 3.8 Efisiensi Penggunaan Sumber Daya pada Sasaran 1

No	Sasaran	Indikator Kinerja	% Capaian Kinerja (>100%)	% Penyerapan Anggaran	Tingkat Efisiensi
1	Meningkatnya aktivitas perdagangan dalam dan luar negeri	Kontribusi sektor Perdagangan terhadap PDRB	103%	98,36%	4,64%
		Persentase Potensi Komodity Unggulan Kabupaten yang terpublikasi	100%	96,01%	3,99%
		Cakupan bina kelompok pedagang/usaha informal %)	121%	100%	21,00%

e. Analisis Program dan Kegiatan yang Menunjang Pencapaian Kinerja

Program dan kegiatan yang menunjang pencapaian kinerja sasaran 1 (satu) dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Tabel. 3.9 Program dan Kegiatan yang menunjang sasaran 1

INDIKATOR SASARAN	PROGRAM	KEGIATAN	Anggaran	Realisasi	Persentase Anggaran
Kontribusi sektor Perdagangan terhadap PDRB	Program Peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam Negeri	Kegiatan Fasilitas Ke mudahan Perijinan Pengembangan Usaha	Rp 20.000.000,00	Rp 20.000.000,00	100,0%
		· Kegiatan Pengembangan an Pasar Lelang Daerah	Rp 16.000.000,00	Rp 15.950.000,00	99,7%
		· Kegiatan Fasilitas Pasar Murah	Rp 116.820.000,00	Rp 116.820.000,00	100,0%
Persentase Potensi Komodity Unggulan Kabupaten yang terpublikasi	Program Peningkatan dan Pengembangan Ekspor	-Sosialisasi Kebijakan Penyederhanaan Prosedur dan Dokumen Ekspor dan Impor	Rp 13.366.000,00	Rp 13.366.000,00	100,0%
		-Pengembangan database informasi potensi unggulan	Rp 13.010.000,00	Rp 12.760.000,00	98,1%
		-Promosi Produk Daerah	Rp 130.250.000,00	Rp 124.250.000,00	95,4%
Cakupan bina kelompok pedagang/usaha informal %)	Program Pembinaan Pedagang Kaki Lima dan Asongan	-Penyuluhan Peningkatan Disiplin Pedagang Kaki Lima dan Asongan	Rp 10.347.000,00	Rp 10.347.000,00	100,0%
	Program Pemberdayaan Usaha Dagang Kecil dan Menengah	Pembinaan Peningkatan Promosi Produk UDKM	Rp 10.750.000,00	Rp 10.750.000,00	100,0%
		Pelatihan Clean Produk dan Kemasan UDKM	Rp 10.000.000,00	Rp 10.000.000,00	100,0%

Program dan Kegiatan yang Menunjang Pencapaian Kinerja sebagai berikut :

1. Program Peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam Negeri

Pada Tahun 2019 Program ini dialokasikan anggaran sebesar Rp 5.077.724.500,- dengan realisasi mencapai Rp 4.994.391.533,51 atau sebesar

98.35% Sasaran program adalah Meningkatnya aktivitas perdagangan dalam dan luar negeri dengan hasil yang dicapai Jumlah Pasar yang di Rehabilitasi. Adapun Kegiatan yang dilaksanakan adalah sebagai berikut :

a. Fasilitasi Kemudahan Perizinan Pengembangan Usaha

Tercapainya Peningkatan Penerimaan Retribusi PAD yang didukung dengan Kegiatan Fasilitasi Kemudahan Perizinan Pengembangan Usaha dengan Target Penerimaan tertentu. Pelaksanaan Kegiatan ini dilakukan dengan cara mendatangi dan memfasilitasi pengusaha yang tersebar di 27 Kecamatan di Kabupaten Bone untuk mengurus izin Usaha (HO). Pada Tahun 2019 dengan dana DAU sebesar Rp.20.000.000,- dengan Realisasi Keuangan sebesar Rp. 20.000.000,- atau sebesar 100 %

b. Pengembangan Pasar Lelang Daerah;

Pengembangan Pasar Lelang Daerah dimaksudkan untuk mewujudkan Jaringan Pemasaran dan Harga serta mempromosikan hasil komoditi Unggulan Kabupaten Bone, Maka Kegiatan Pasar Lelang Daerah dilakukan dengan Mengikutsertakan Komoditi Unggulan Daerah Kabupaten Bone dan pelaku usaha/ Calon pengusaha pada Pasar lelang yang dilaksanakan di Makassar. Pada Tahun 2019 kegiatan ini dilaksanakan dengan dana DAU sebesar Rp. 16.000.000,- dengan Realisasi Keuangan sebesar Rp. 15.950.000,- atau sebesar 99.69%

c. Fasilitasi Pasar Murah.

Dalam rangka Program Peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam Negeri pada Kegiatan Fasilitasi Pasar Murah yang ditujukan supaya terciptanya atau terwujudnya standarisasi harga yang stabil dan lebih murah sehingga masyarakat utamanya masyarakat ekonomi lemah dapat mendapatkan Sembako dengan harga murah.

Tahun 2019 Pelaksanaan Fasilitasi Pasar Murah dilaksanakan dengan penyerahan Paket Sembako sebanyak 1000 Paket kepada masyarakat dan Pelaksanaan Pasar Murah dengan melibatkan Distributor sebanyak 3 Kali yaitu Sebelum Bulan Ramadhan, Sebelum Idul Fitri dan Sebelum Natal yang dilaksanakan di Kecamatan Tanete Riattang, dengan dana DAU sebesar Rp.116.820.000,- dengan realisasi keuangan Rp. 116.820.000,- atau sebesar 100 %;

d. Pengembangan Sarana dan Prasarana Perdagangan;

Kegiatan Pengembangan Sarana dan Prasarana Perdagangan pada Program Peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam Negeri ditandai dengan terlaksananya Pembangunan/ Renovasi Pasar . Pembangunan Pasar ini

dilaksanakan dengan menggunakan Dana Alokasi Khusus (DAK) untuk Kegiatan Konstruksi dan Dana Alokasi Umum (DAU) untuk dana penunjang lainnya. Pasar yang diharapkan, yaitu pasar yang representatif, bersih dan nyaman.

Pada Tahun 2019 Pembangunan/ Revitalisasi Pasar Rakyat yang dilaksanakan sebanyak 3 Unit Yaitu Pasar Usa Kecamatan Palakka, Pasar Congko Kecamatan Barebbo, dan Pasar Pallime Kecamatan Cenrana dengan menggunakan dana DAK-DAU sebesar Rp 4.795.496.000,- dengan realisasi keuangan Tahun 2019 sebesar Rp. 4.714.607.533,51 atau sebesar 98.31 %.

e. Operasionalisasi Sistem Resi Gudang;

Kegiatan Operasionalisasi Sistem Resi Gudang dilakukan dengan cara mengoperasikan dan memelihara Gudang yang terletak di Kecamatan Dua Bocoe . Tahun 2019 Pelaksanaan Kegiatan Operasionalisasi Sistem Resi Gudang Menggunakan dana DAU sebesar Rp. 72.098.500,- dengan realisasi sebesar Rp. 69.788.000,- atau sebesar 96.80 %

f. Bimbingan Teknis Pengelolah Pasar dan Pergudangan;

Bimbingan Teknis Pengelolah pasar dan Pergudangan di laksanakan dengan tujuan peningkatan Pengetahuan Pengelolah Pasar dan Pergudangan. Bimbingan Teknis ini ditujukan pada Aparat dan Pengelolah Pasar dan Pergudangan. Bimbingan Teknis ini dengan dana DAU sebesar Rp. 57.310.000,- dengan Realisasi Tahun 2019 sebesar Rp. 57.226.000,- atau sebesar 99.85 %.

2. Pogram Peningkatan dan Pengembangan Ekspor

Pada Tahun 2019 Program ini dialokasikan anggaran sebesar Rp.156.626.000,- dengan realisasi keuangan sebesar Rp.150.376.000,-.. Kegiatan yang dilaksanakan adalah sebagai berikut:

a. Sosialisasi Kebijakan Penyederhanaan Prosedur dan Dokumen Ekspor dan Impor

Kegiatan Sosialisasi Kebijakan Penyederhanaan Prosedur dan Dokumen Ekspor dan Impor dilaksanakan dengan dana DAU sebesar Rp. 13.366.000,-dan realisasi Keuangan sebesar Rp. 13.366.000,- atau sebesar 100%.

b. Pengembangan Data Base Informasi Potensi Unggulan

Kegiatan Pengembangan Data Base Informasi Potensi Unggulan dilaksanakan dengan dana DAU sebesar Rp. 13.010.000,-dan realisasi Keuangan sebesar Rp. 12.760.000,- atau sebesar 98.08%.

c. Promosi Produk Daerah

Kegiatan Promosi Produk Daerah dilaksanakan dengan cara ikut serta pada kegiatan Pameran Produk Unggulan Kabupaten Bone. Pada Tahun 2019 Pameran yang diikuti adalah Pameran di Jakarta, Makassar Kegiatan ini dilaksanakan dengan dana DAU sebesar Rp. 130.250.000,- dan realisasi Keuangan sebesar Rp. 124.250.000,- atau sebesar 95.39%.

3. Program Pembinaan Pedagang Kaki Lima dan Asongan

Pada Tahun 2019 Program ini dialokasikan anggaran sebesar Rp.10.347.000,- dengan realisasi keuangan sebesar Rp.10.347.000,- Kegiatan yang dilaksanakan adalah sebagai berikut:

a. Penyuluhan Peningkatan Disiplin Pedagang Kaki Lima dan Asongan

Kegiatan Penyuluhan Peningkatan Disiplin Pedagang Kaki Lima dan Asongan dilaksanakan dengan dana DAU sebesar Rp. 10.347.000,- dan realisasi Keuangan sebesar Rp. 10.347.000,- atau sebesar 100%.

4. Program Pemberdayaan Usaha Dagang Kecil dan Menengah

Pada Tahun 2019 Program ini dialokasikan anggaran sebesar Rp.20.750.000,- dengan realisasi keuangan sebesar Rp.20.750.000,- Kegiatan yang dilaksanakan adalah sebagai berikut:

a. Pembinaan Peningkatan Promosi Produk UDKM

Kegiatan Pembinaan Peningkatan Promosi Produk UDKM dilaksanakan dengan dana DAU sebesar Rp. 10.750.000,- dan realisasi Keuangan sebesar Rp. 10.750.000,- atau sebesar 100%.

b. Pelatihan Clean Produk dan Kemasan UDKM

Kegiatan Pelatihan Clean Produk dan Kemasan UDKM dilaksanakan dengan dana DAU sebesar Rp. 10.000.000,- dan realisasi Keuangan sebesar Rp. 10.000.000,- atau sebesar 100%.

b. .Permasalahan dan Alternatif Solusi

1. Permasalahan

Beberapa permasalahan yang dihadapi dalam pelaksanaan program dan kegiatan yaitu sebagai berikut:

- a) Banyaknya pedagang kaki lima/ Asongan yang berjualan di tempat yang tidak seharusnya. Sehingga mengganggu Kenyamanan masyarakat lainnya.
- b) Kurangnya kesadaran pedagang kaki lima dalam pengelolaan sampah
- c) Kurangnya kesadaran pelaku usaha untuk mengurus Izin Perdagangan (HO) dikarenakan Jarak antara lokasi tempat usaha dengan lokasi pengurusan izin HO yang jauh

- d) Kurangnya minat pelaku usaha untuk mengikuti Pasar Lelang dikarenakan pengusaha lebih memilih menjual langsung Komoditi yang dimiliki kepada Pengusaha di Makassar.
- e) Pelaku usaha tidak memanfaatkan Gudang yang disediakan dikarenakan Pelaku usaha tidak memahami bagaimana sistem Resi Gudang yang maksud.
- f) Belum terbentuknya struktur pengelola resi gudang yang permanen dikarenakan kurangnya tenaga aparat yang berkompeten.
- g) Masih adanya pedagang nakal yang melakukan pelanggaran yang dapat merugikan konsumen

2. Solusi

Solusi yang diambil dalam menyelesaikan masalah diatas adalah sebagai berikut:

- a) Melakukan penyuluhan langsung kepada pedagang kaki lima/Asongan tentang peningkatan disiplin pedagang dalam berjualan.
- b) Melakukan fasilitasi bagi pelaku usaha yang lokasinya jauh dengan cara menjemput dan melakukan sosialisasi secara langsung pada pengusaha.
- c) Mengikut sertakan pelaku usaha dalam kegiatan Pasar lelang yang dilaksanakan di Makassar sehingga membuka pengetahuan Pelaku Usaha bagaimana sistem pelaksanaan Pasar Lelang yang Maksud.
- d) Melakukan Kegiatan Sosialisasi Sistem Resi Gudang pada Pelaku Usaha yang bekerja sama dengan BAPPEPTI (Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi)
- e) Mengikut sertakan Aparat dalam Bimbingan Teknis Pengelolaan Pasar dan Pergudangan.

2. Sasaran 2: Meningkatnya Perlindungan Konsumen

a. Perbandingan Antara Target dan Realisasi

Tabel 3.10 Capaian Indikator Kinerja Sasaran Meningkatnya Perlindungan Konsumen

N O	SASARAN	INDIKATOR IMPACT	TARGET	Realisasi	Capaian
			2019	2019	%
(1)	(3)	(4)	(6)		
2	Meningkatnya Perlindungan Konsumen	Persentase Alat UTTP yang Lolos Uji Tera Ulang	100%	100%	100%
		Persentase Laporan Konsumen yang diTindak Lanjuti	100%	100%	100%

Berdasarkan tabel tersebut di atas dapat diketahui bahwa realisasi target pada indikator kinerja utama 1 yaitu Persentase Alat UTTP yang Lolos Uji Tera Ulang ,dengan capaian **100% telah mencapai target** yang telah ditetapkan. Realisasi pada tahun 2019 mencapai, 100%, dari target 100% dengan persentase 100% Capaian ini dikategorikan **Baik**.

Berdasarkan tabel tersebut di atas dapat diketahui bahwa realisasi target pada indikator kinerja utama 2 yaitu Persentase Laporan Konsumen yang diTindak Lanjuti, dengan capaian **100 % telah mencapai target** yang telah ditetapkan. Realisasi pada tahun 2018 mencapai 100%, dari target 100 % dengan persentase 100 % Capaian ini dikategorikan **Baik**.

b. Perbandingan Antara Realisasi Capaian Kinerja Dengan Tahun Sebelumnya

Tabel 3.11 Perbandingan Capaian Indikator Kinerja Sasaran 2.

INDIKATOR IMPACT	BASELINE	TARGET		REALISASI			Capaian		
	2017	2018	2019	2017	2018	2019	2017	2018	2019
(4)	(10)	(11)	(10)	(10)	(11)	(11)	(9)	(10)	(11)
Persentase Alat UTTP yang Lolos Uji Tera Ulang	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
Persentase Laporan Konsumen yang diTindak Lanjuti	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%



Gambar 3.4 Grafik Perbandingan Capaian Kinerja Sasaran 2

Dari gambar diatas dapat diperoleh data sebagai berikut:

1. Capaian pada Indikator 1 yaitu Persentase Alat UTTP yang Lolos Uji Tera Ulang tahun 2019 mencapai 100 % dari target 100% tidak mengalami **Peningkatan ataupun penurunan** dari tahun 2018 (tahun sebelumnya)
2. Capaian pada Indikator 2 yaitu Persentase Laporan Konsumen yang diTindak Lanjuti tahun 2019 mencapai 100 % dari target 100% tidak

mengalami **Peningkatan** ataupun **penurunan** dari tahun 2018 (tahun sebelumnya)

c. **Perbandingan Antara Realisasi *Kinerja* Dengan Periode Akhir Renstra**
Dapat dilihat pada Tabel dibawah ini:

Tabel. 3.12 Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2019 dengan Target Akhir Renstra pada sasaran 2

NO	SASARAN	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2019	CAPAIAN (%)
2	Meningkatnya Perlindungan Konsumen	Persentase Alat UTTP yang Lolos Uji Tera Ulang	100%	100%	100%
		Persentase Laporan Konsumen yang diTindak Lanjuti	100%	100%	100%

Berdasarkan tabel diatas terdapat 2 (dua) capaian tahun 2019 yang sama dengan target akhir dari renstra dengan rincian sebagai berikut:

1. Capaian pada Indikator 1 yaitu Persentase Alat UTTP yang Lolos Uji Tera Ulang tahun 2019 mencapai 100 % dari target 100% apabila dibandingkan dengan target Akhir Renstra. Hal ini menunjukkan Realisasi capaian Tahun 2019 sama dengan Target Akhir Renstra
2. Capaian pada Indikator 2 yaitu Persentase Laporan Konsumen yang diTindak Lanjuti tahun 2019 mencapai 100 % dari target 100% apabila dibandingkan dengan target Akhir Renstra. Hal ini menunjukkan Realisasi capaian Tahun 2019 sama dengan Target Akhir Renstra

d. **Analisis *Penyebab Keberhasilan / Kegagalan atau Peningkatan / Penurunan Kinerja***

1. Persentase Alat UTTP yang Lolos Uji Tera Ulang
Persentase Alat UTTP yang Lolos Uji Tera Ulang Tahun 2019 telah mencapai target yaitu dari 100 % hal ini didukung oleh adanya MOU antara Pemerintah Kabupaten Bone dengan Pemerintah Kota Pare-Pare dalam hal pelaksanaan Tera Ulang (Metrologi Legal) sehingga Usulan Tera Ulang untuk alat UTTP dapat dilakukan dengan baik.

2. Persentase Laporan Konsumen yang diTindak Lanjuti

Persentase Laporan Konsumen yang diTindak Lanjuti terealisasi dengan adanya Laporan dari Masyarakat, Lembaga atau Badan tertentu mengenai pelanggaran yang dilakukan oleh pedagang, pengusaha ataupun perusahaan.

Pada tahun 2019 Jumlah Laporan Masyarakat yang masuk adalah sebanyak 4 Laporan yaitu :

- a. Laporan mengenai Peningkatan Harga beras yang dilakukan oleh pedagang sepihak penyelesaiannya dilakukan operasi pasar langsung pada pedagang beras dan memberikan penyuluhan langsung.
- b. Laporan Mengenai adanya Barang Kadaluarsa yang beredar di Pasar Tradisional maupun Modern. Penyelesaiannya adalah dengan melakukan peninjauan langsung ke lokasi yang dimaksud dan melakukan penyitaan barang kadaluarsa tersebut.
- c. Laporan mengenai adanya salah satu perusahaan pembiayaan yang menahan BPKB Kendaraan Konsumen yang telah lunas. Penyelesaiannya yaitu dilakukan dengan cara mendatangi perusahaan tersebut dan menyelesaikan secara kekeluargaan.
- d. Laporan mengenai kelangkaan Tabung Gas LPG 3 Kg yang diakibatkan adanya penimbunan oleh pengusaha rumah makan. Penyelesaiannya adalah dengan melakukan operasi langsung dan menyita Tabung LPG 3 Kg milik pengusaha rumah makan dan memberikan sosialisasi mengenai kalangan yang seharusnya menggunakan Tabung Gas LPG 3 Kg

e. Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Bagian yang disajikan dalam tabel ini terkait dengan efisiensi anggaran untuk sasaran yang pencapaian kinerjanya mencapai atau lebih dari 100%. Terlihat bahwa mayoritas dari satu indikator, menunjukkan pencapaian yang sama atau lebih dari 100%. Banyaknya sasaran yang berhasil dicapai dengan sumber daya yang efisien menunjukkan bahwa efisiensi anggaran telah mencapai tingkat yang tinggi ataupun sangat tinggi. Kondisi ini sejalan dengan prinsip pengelolaan anggaran publik dan lebih jauh, juga sejalan dengan prinsip pemerintahan yang baik, yang salah satunya adalah pengelolaan sumber daya anggaran yang efisien dalam mencapai tujuan dan sasaran pembangunan.

Tabel 3.13 Efisiensi Penggunaan Sumber Daya pada sasaran 2

No	Sasaran	Indikator Kinerja	% Capaian Kinerja (>100%)	% Penyerapan Anggaran	Tingkat Efisiensi
2	Meningkatnya Perlindungan Konsumen	Persentase Alat UTTP yang Lolos Uji Tera Ulang	100%	100%	0,00%
		Persentase Laporan Konsumen yang diTindak Lanjuti	100%	99,99%	0,01%

f. Analisis Program dan Kegiatan yang Menunjang Pencapaian Kinerja

Program dan kegiatan yang menunjang pencapaian kinerja sasaran 2 (dua) dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Tabel. 3.14 Program dan Kegiatan Menunjang Sasaran 2

INDIKATOR SASARAN	PROGRAM	KEGIATAN	Anggaran	Realisasi	Persentase Anggaran
Persentase Alat UTTP yang Lolos Uji Tera Ulang	Program Perlindungan Konsumen dan Pengamanan Perdagangan	-Operasionalisasi dan Pengembangan UPT Kemetrolgian Daerah	Rp 12,500,000.00	Rp 12,500,000.00	100.0%
Persentase Laporan Konsumen yang diTindak Lanjuti		-Peningkatan Pengawasan Peredaran Barang dan Jasa	Rp 65,750,000.00	Rp 65,741,666.00	100.0%
		-Monitoring Bahan Kebutuhan Pokok	Rp 29,326,000.00	Rp 29,326,000.00	100.0%
		Penanganan Pengaduan Konsumen	Rp 7,000,000.00	Rp 7,000,000.00	100.0%

Program dan Kegiatan yang Menunjang Pencapaian Kinerja sebagai berikut :

1. Program Program Perlindungan Konsumen dan Pengamanan Perdagangan
Pada Tahun 2019 Program ini dialokasikan anggaran sebesar Rp.114.576.000,- dengan realisasi keuangan sebesar Rp.114.567.666,-.Sasaran program adalah Meningkatnya aktivitas perdagangan dalam dan luar negeri dengan hasil yang dicapai Jumlah Kecamatan yang Mendapatkan Data Pengawasan UTTP. Kegiatan yang dilaksanakan adalah sebagai berikut:
 - a. Peningkatan Pengawasan Peredaran Barang dan Jasa;
Kegiatan Peningkatan Pengawasan Peredaran Barang dan Jasa dilaksanakan dengan dana DAU sebesar Rp. 12.500.000,-dan realisasi Keuangan sebesar Rp. 12.500.000,- atau sebesar 100 %.
 - b. Operasionalisasi dan Pengembang UPT Kemetrolgian Daerah;
Kegiatan Operasionalisasi dan Pengembangan UPT Kemetrolgian Daerah merupakan kegiatan Pengendalian dan Terwujudnya Tertib Ukur pada Alat Ukur Takar Timbangan dan Perlengkapannya (UTTP), utamanya terhadap

Pemilik/ Pengguna dan Penjual BDKT, pelaksanaan pengawasan dalam upaya Peningkatan Pengawasan Kemetrolagian yang bekerja sama dengan Dinas Perdagangan Provinsi Sulawesi Selatan pada Kegiatan Operasionalisasi dan Pengembangan UPT Kemetrolagian Daerah tetap tersebar di 27 Kecamatan. Pada Tahun 2019 Kegiatan ini dilaksanakan dengan dana DAU sebesar Rp. 65.750.000,- dan realisasi Keuangan sebesar Rp. 65.741.666,- atau sebesar 99.99 %.

c. Monitoring Bahan Kebutuhan Pokok;

Tersedianya Data Harga Sembilan Bahan Pokok sebagai wujud dari Standarisasi Harga pada kegiatan Monitoring Bahan Kebutuhan Pokok dalam rangka peningkatan perlindungan terhadap konsumen dengan harga yang stabil dan terjangkau sebagai upaya pengamanan perdagangan dan pada kegiatan ini untuk mempermudah konsumen dan masyarakat pada umumnya maka Data Harga Sembilan Bahan Pokok dapat diakses pada Koran Radar terbitan setiap 1 kali sebulan. Pada Tahun 2019 Kegiatan ini dilaksanakan dengan dana DAU sebesar Rp. 29.326.000,- dan realisasi Keuangan sebesar Rp. 29.326.000,- atau sebesar 100 %.

d. Penanganan Peneduguan Konsumen

Kegiatan Penanganan Peneduguan Konsumen dilaksanakan dengan dana DAU sebesar Rp. 7.000.000,- dan realisasi Keuangan sebesar Rp. 7.000.000,- atau sebesar 100 %.

g. .Permasalahan dan Alternatif Solusi

1. Permasalahan

Beberapa permasalahan yang dihadapi dalam pelaksanaan program dan kegiatan yaitu sebagai berikut:

- a) Belum adanya SDM yang siap untuk dijadikan tenaga Penera di Kabupaten Bone sehingga masih bergantung pada MOU dengan Pemerintah Kota Pare-Pare
- b) Kurangnya kesadaran pedagang akan pentingnya menjaga kepercayaan konsumen demi kelancaran usahanya
- c) Kurangnya kesadaran Pedagang untuk mengusulkan pelaksanaan Tera Ulang pada Alat UTTP yang dimilikinya.
- d) Masih adanya pedagang nakal yang melakukan pelanggaran yang dapat merugikan konsumen
- e) Masih Kurangnya Laporan pelanggaran yang merugikan konsumen.

2. Solusi

Solusi yang diambil dalam menyelesaikan masalah diatas adalah sebagai berikut:

- a) Mengusulkan ke BKPSDM Kab. Bone untuk menyiapkan Aparat yang kompetent untuk bisa ikut pada pelatihan Kemetrolagian Legal
- b) Melakukan Operasi Pasar terkait Laporan yang Masuk
- c) Melakukan Pengawasan dan Monitoring Barang kebutuhan Pokok semingu sekali.
- d) Melakukan sosialisasi kepada masyarakat mengenai hak yang harus diterima Konsumen

3. Sasaran 3: Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Urusan Perdagangan

a. Perbandingan Antara Target dan Realisasi

Tabel 3.15 Capaian Indikator Kinerja Sasaran Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Urusan Perdagangan

NO	SASARAN	INDIKATOR	TARGET 2019	REALISASI 2019	CAPAIAN %
3	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Urusan Perdagangan	Predikat Evaluasi SAKIP oleh APIP	CC	B	114 %

Berdasarkan tabel tersebut di atas dapat diketahui bahwa realisasi target pada indikator kinerja utama 1 yaitu Predikat Evaluasi SAKIP oleh APIP , Nilai akuntabilitas kinerja Dinas Perdagangan Tahun 2019 dengan target CC. Pengukuran Capaian Indikator kinerja Tahun 2019 didasarkan pada Hasil Evaluasi implementasi SAKIP Tahun 2018 yang dilaksanakan oleh Inspektorat Daerah Kab. Bone pada Tahun 2019 hal ini disebabkan Evaluasi Sakip Untuk Tahun 2019 baru akan dilaksanakan pada Tahun 2020.

Berdasarkan tabel tersebut di atas dapat diketahui bahwa realisasi target pada indikator kinerja utama 1 yaitu Predikat Evaluasi SAKIP oleh APIP ,dengan capaian **114% telah melebihi target** yang telah ditetapkan. Realisasi pada tahun 2019 dengan Predikat B, dari target predikat CC dengan persentase capaian sebesar 114% Capaian ini dikategorikan **Sangat Baik**.

b. Perbandingan Antara Realisasi Capaian Kinerja Dengan Tahun Sebelumnya

Tabel 3.16 Perbandingan Capaian Indikator Kinerja

INDIKATOR	BASELINE	TARGET		REALISASI			Capaian		
	2017	2018	2019	2017	2018	2019	2017	2018	2019
Predikat Evaluasi SAKIP oleh APIP	Belum ada	CC	CC	Belum ada	Belum ada	B	-	-	114%

Capaian pada Indikator 1 yaitu Predikat Evaluasi SAKIP oleh APIP Tahun 2019 mencapai 114 % dari target 100% tidak mengalami **Peningkatan ataupun penurunan** dari tahun 2018 (tahun sebelumnya) hal ini dikarenakan pada Tahun 2018 pada Dinas Perdagangan tidak dilakukan Evaluasi SAKIP oleh APIP inspektorat Daerah Kabupaten Bone.

c. Perbandingan Antara Realisasi Kinerja Dengan Periode Akhir Renstra

Dapat dilihat pada Tabel dibawah ini:

Tabel. 3.17 Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2019 dengan Target Akhir Renstra pada sasaran 3

NO	SASARAN	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2019	CAPAIAN (%)
3	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Urusan Perdagangan	Predikat Evaluasi SAKIP oleh APIP	BB	B	86%

Realisasi pada Indikator 1 yaitu Predikat Evaluasi SAKIP oleh APIP tahun 2019 dengan Predikat B dengan capaian sebesar 86 % bila dibandingkan dengan Target Akhir Renstra . sehingga dapat disimpulkan Realisasi Tahun 2019 mulai mendekati Target Akhir Renstra Tahun 2023.

d. Analisis Penyebab Keberhasilan / Kegagalan atau Peningkatan / Penurunan Kinerja

Beberapa Penyebab Keberhasilan Peningkatan Kinerja terkait Predikat Evaluasi SAKIP oleh APIP yaitu:

- 1. Terintegritasnya Program Kegiatan yang ada di RPJMD, Renstra , Renja dengan DPA Dinas Perdagangan
- 2. Terukurnya Indikator dari Sasaran yang tertuang dalam Renstra 2018-2023
- 3. Konsistensi dalam hal pencapaian kinerja yang tertuang dalam Perjanjian Kinerja
- 4. Perhatian Khusus Pimpinan akan pentingnya penilaian SAKIP

e. Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Bagian yang disajikan dalam tabel ini terkait dengan efisiensi anggaran untuk sasaran yang pencapaian kinerjanya mencapai atau lebih dari 100%. Terlihat bahwa mayoritas dari satu indikator, menunjukkan pencapaian yang sama atau lebih dari 100%. Banyaknya sasaran yang berhasil dicapai dengan sumber daya yang efisien menunjukkan bahwa efisiensi anggaran telah mencapai tingkat yang tinggi ataupun sangat tinggi. Kondisi ini sejalan dengan prinsip pengelolaan anggaran publik dan lebih jauh, juga sejalan dengan prinsip pemerintahan yang baik, yang salah satunya adalah pengelolaan sumber daya anggaran yang efisien dalam mencapai tujuan dan sasaran pembangunan.

Tabel 3.18 Efisiensi Penggunaan Sumber Daya pada sasaran 3

No	Sasaran	Indikator Kinerja	% Capaian Kinerja (>100%)	% Penyerapan Anggaran	Tingkat Efisiensi
3	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Urusan Perdagangan	Predikat Evaluasi SAKIP oleh APIP	114%	66,27%	47,73%

h. Analisis Program dan Kegiatan yang Menunjang Pencapaian Kinerja

Program dan kegiatan yang menunjang pencapaian kinerja sasaran 3 (tiga) dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Tabel. 3.19 Program dan Kegiatan menunjang sasaran 3

PROGRAM	KEGIATAN	Anggaran	Realisasi	Persentase Anggaran
Program Penunjang Pemerintahan Umum	Penyusunan Rencana Perangkat Daerah	Rp 42.000.000,00	Rp 30.648.800,00	73,0%
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Laporan Capaian Kinerja dan Keuangan	'Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Iktisar Realisasi Kinerja SKPD	Rp 36.200.000,00	Rp 29.825.950,00	82,4%
	'Monitoring dan Evaluasi Capaian Kinerja dan Keuangan	Rp 29.900.000,00	Rp 29.899.828,00	100,0%
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan	Rp 34.690.000,00	Rp 34.690.000,00	100,0%
Program Peningkatan Sarana dan Prasraana Aparatur	Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional	Rp 600.000.000,00	Rp 595.144.000,00	99,2%
	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	Rp 669.500.000,00	Rp -	0,0%
	Pengadaan Mabeleur	Rp 8.600.000,00	Rp -	0,0%
	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Rp 18.106.000,00	Rp 15.979.000,00	88,3%
	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas Operasional	Rp 63.800.000,00	Rp 54.227.400,00	85,0%
Progam Pelayanan Administrasi Perkantoran	Penyediaan Jasa Komunikasi,Sumber Daya Air dan Listrik	Rp 25.800.000,00	Rp 23.913.439,00	92,7%
	Penyedia Jasa Administrasi Keuangan	Rp 101.001.600,00	Rp 88.356.567,60	87,5%
	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Rp 7.498.000,00	Rp 6.198.000,00	82,7%
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Rp 2.605.000,00	Rp 2.560.000,00	98,3%
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Paeraturan Perundang-undangan	Rp 37.500.000,00	Rp 36.280.000,00	96,7%
	Rapat-rapat koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah dan Luar Daerah	Rp 386.248.110,00	Rp 385.775.585,00	99,9%
	Pelaksanaan Administrasi Perkantoran	Rp 115.568.750,00	Rp 110.507.400,00	95,6%

Program dan Kegiatan yang Menunjang Pencapaian Kinerja sebagai berikut :

1) Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

Pada Tahun 2019 Program ini dialokasi dana sebesar Rp.676.221.460,- realisasi Rp.653.590.991,- atau 96.65 % yang terdiri dari 7 Kegiatan yaitu:

- a. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik dengan tujuan pelaksanaan supaya terpenuhinya kebutuhan telepon, air dan listrik dalam setahun, dengan dana DAU Rp. 25.800.000,- dengan realisasi Rp. 23.913.439,- atau sebesar 92.69%;
- b. Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan ditujukan supaya terwujudnya tertib administrasi keuangan dan terlaksananya kegiatan administrasi keuangan,

dengan dana DAU Rp. 101.001.600,- dengan realisasi Rp. 88.356.567.60,- atau sebesar 87.48%;

- c. Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor dilaksanakan sebagai tujuan agar terpeliharanya kantor dan tersedianya peralatan serta bahan pembersih kantor dalam setahunnya, dengan dana DAU Rp. 7.498.000,- dengan realisasi Rp. 6.198.000,- atau sebesar 82.66 %;
- d. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor supaya terpeliharanya komponen listrik kantor yang representatif, dengan dana DAU Rp. 2.605.000,- dengan realisasi Rp. 2.560.000,- atau sebesar 98.27%;
- e. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan ditujukan dengan tersedianya bahan bacaan (surat kabar dan majalah) diharapkan terwujudnya peningkatan sumber daya aparatur pada Dinas Perdagangan Kabupaten Bone, dengan dana DAU Rp. 37.500.000,- dengan realisasi Rp. 36.280.000,- atau sebesar 96.75 %;
- f. Rapat-rapat Kordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah dan Luar Daerah, kegiatan ini ditujukan terlaksananya dan terwujudnya keikutsertaan dalam rapat-rapat kordinasi dan konsultasi baik dalam daerah maupun luar daerah (dalam propinsi dan luar propinsi), dengan dana DAU Rp. 386.248.110,- dengan realisasi Rp. 385.775.585,- atau sebesar 99.88%;
- g. Pelaksanaan Administrasi Perkantoran sebagai upaya peningkatan kelancaran administrasi dan pelayanan perkantoran dengan tersedianya Alat Tulis Kantor, Barang yang akan dicetak dan digandakan serta tersedianya makan minum pegawai, dengan dana DAU Rp. 115.568.750,- dengan realisasi Rp. 110.507.400,- atau sebesar 95.62%.

2) Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur,

Pada Tahun 2019 Program ini dialokasi dana sebesar Rp.1.360.006.000,- realisasi Rp. 665.350.400,- atau 48.92 % yang terdiri dari 5 Kegiatan yaitu:

- a. Pengadaan Kendaraan Dinas /Operasional yaitu tersedianya pengadaan Kendaraan Roda Empat (double Cabin) Unit Metrologi Legal sebanyak 1 Unit ditujukan untuk meningkatkan kelancaraan pelaksanaan kegiatan Metrologi Legal , dengan dana DAK Rp. 600.000.000,- dengan realisasi Rp. 595.144.000,- atau sebesar 99.19 %;
- b. Pengadaan Peralatan Gedung Kantor dengan tersedianya pengadaan Timbangan Tera Ulang ditujukan untuk meningkatkan Kinerja Pelaksanaan Tera Ulang, dengan dana DAK Rp. 669.500.000,- dengan realisasi Rp. 0,-

atau sebesar 0 % hal ini disebabkan Tidak adanya Pihak Ketiga yang memasukkan Penawaran pada Proses Lelang.

- c. Pengadaan Mabeleur dengan tersedianya pengadaan 2 Unit Meja kerja, dengan dana DAU Rp. 8.600.000,- dengan realisasi Rp. 0,- atau sebesar 0 %;
- d. Pemeliharaan Rutin/ Berkala Gedung Kantor ditujukan supaya terwujudnya kantor lebih bersih pada pemeliharaan kantor setahunnya, dengan dana DAU Rp. 18.106.000,- dengan realisasi Rp. 15.979.000,- atau sebesar 88.25 %
- e. Pemeliharaan Rutin/ Berkala Kendaraan Dinas/ Operasional ditujukan supaya terlaksananya pemeliharaan sarana dan prasarana aparatur (kendaraan dinas/ operasional) diharapkan tersedianya peningkatan sarana aparatur, dengan dana DAU Rp. 63.800.000,- dengan realisasi Rp. 54.227.400,- atau sebesar 85%;

3) Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

Pada Tahun 2019 Program ini dialokasi dana sebesar Rp. 34.690.000,- realisasi Rp.34.690.000,- atau 100 % dengan yang terdiri dari 1 Kegiatan yaitu:

- a. Terlaksananya kursus Bintek Aparat pada Kegiatan Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan sehingga tercapainya tenaga profesional sesuai bidang tugasnya, dengan dana DAU sebesar Rp. 34.690.000,- realisasi Rp. 34.690.000,- atau 100 %

4) Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

Pada Tahun 2019 Program ini dialokasikan anggaran sebesar Rp 66.100.000,- dengan realisasi mencapai Rp 59.725.778 atau sebesar 90.36 % yang meliputi 2 kegiatan yaitu :

- a. Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Iktisar Realisasi Kinerja SKPD dengan dana DAU sebesar Rp. 36.200.000,- dengan realisasi Rp. 29.825.950,- atau sebesar 82.39%.
- b. Monitoring dan Evaluasi Capaian Kinerja dan Keuangan dengan dana DAU sebesar Rp. 29.900.000,- dengan realisasi Rp. 29.899.828,- atau sebesar 99.99%.

5) Program Penunjang Pemerintahan Umum

Pada Tahun 2019 Program ini dialokasikan anggaran sebesar Rp 42.000.000,- dengan realisasi mencapai Rp 30.648.800 atau sebesar 72.97% yang meliputi 1 kegiatan yaitu :

- a. Penyusunan Rencana Perangkat Daerah dengan dana DAU sebesar Rp. 42.000.000,- dengan realisasi Rp. 30.648.800,- atau sebesar 72.97%.

i. .Permasalahan dan Alternatif Solusi

3. Permasalahan

Beberapa permasalahan yang dihadapi dalam pelaksanaan program dan kegiatan yaitu sebagai berikut:

- a) Masih Rendahnya Evaluasi Internal yang dilakukan terhadap Pencapaian Rencana Aksi dan Perjanjian Kinerja

4. Solusi

Solusi yang diambil dalam menyelesaikan masalah diatas adalah sebagai berikut:

- a) Melakukan Sosialisasi untuk melakukan Evaluasi internal secara berkala

3.2 REALISASI ANGGARAN

1. Realisasi Anggaran

Realisasi anggaran APBD yang dikelola Dinas Perdagangan Tahun Anggaran 2019 sebesar Rp.8.450.416.942,11,- atau 89.33%.

1. Anggaran Kinerja :

- Belanja Tidak Langsung	Rp. 1.715.978.733,- (90.28%)
- Belanja Langsung	Rp. 6.734.438.209,11,- (89.09%)
<hr/>	
Jumlah	Rp. 8.450.416.942,11,- (89.33%)

2. Pemanfaatan Anggaran

- a. Pemanfaatan anggaran yang bersumber dari anggaran kinerja Dinas Perdagangan terdiri dari :

1) Belanja Tidak Langsung

Realisasi anggaran belanja tidak langsung Dinas Pedagangan Kabupaten Bone dalam Tahun Anggaran 2019 sebesar Rp. 1.715.978.733,- (90.28%) yang diarahkan untuk :

Gaji dan Tunjangan	Rp. 1.133.280.168
Tambahan Penghasilan PNS	Rp 582.698.605
Insentif Pungutan Retribusi daerah	Rp 0,-

2) Belanja Langsung

Realisasi anggaran belanja langsung Dinas Pedagangan Kabupaten Bone Tahun Anggaran 2018 sebesar Rp. 6.734.438.209,11,- (89.09%) dengan jumlah 9 program dan 32 kegiatan.

3. Permasalahan dan Solusi

Beberapa hal yang berpengaruh sehingga pencapaian kinerja sasaran Dinas Perdagangan Kabupaten Bone tahun 2019 belum tercapai secara optimal disebabkan hal-hal sebagai berikut :

- a) Banyaknya pedagang kaki lima/ Asongan yang berjualan di tempat yang tidak seharusnya. Sehingga mengganggu Kenyamanan masyarakat lainnya.
- b) Kurangnya kesadaran pedagang kaki lima dalam pengelolaan sampah
- c) Kurangnya kesadaran pelaku usaha untuk mengurus Izin Perdagangan (HO) dikarenakan Jarak antara lokasi tempat usaha dengan lokasi pengurusan izin HO yang jauh
- d) Kurangnya minat pelaku usaha untuk mengikuti Pasar Lelang dikarenakan pengusaha lebih memilih menjual langsung Komoditi yang dimiliki kepada Pengusaha di Makassar.
- e) Pelaku usaha tidak memanfaatkan Gudang yang disediakan dikarenakan Pelaku usaha tidak memahami bagaimana system Resi Gudang yang maksud.
- f) Belum terbentuknya struktur pengelola resi gudang yang permanen dikarenakan kurangnya tenaga aparat yang berkompeten.
- g) Masih adanya pedagang nakal yang melakukan pelanggaran yang dapat merugikan konsumen
- h) Kurangnya pengetahuan konsumen atas hak yang harus diterima sebagai konsumen

Oleh karena itu untuk tahun yang akan datang diupayakan langkah-langkah antisipatif sebagai berikut :

- a) Melakukan penyuluhan langsung kepada pedagang kaki lima/Asongan tentang peningkatan disiplin pedagang dalam berjualan.
- b) Melakukan fasilitasi bagi pelaku usaha yang lokasinya jauh dengan cara menjemput dan melakukan sosialisasi secara langsung pada pengusaha.
- c) Mengikut sertakan pelaku usaha dalam kegiatan Pasar lelang yang dilaksanakan di Makassar sehingga membuka pengetahuan Pelaku Usaha bagaimana sistem pelaksanaan Pasar Lelang yang Maksud.
- d) Melakukan Kegiatan Sosialisasi Sistem Resi Gudang pada Pelaku Usaha yang bekerja sama dengan BAPPEPTI (Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi)

- e) Mengikut sertakan Aparat dalam Bimbingan Teknis Pengelolaan Pasar dan Pergudangan.
- f) Melakukan Pengawasan dan Monitoring Barang kebutuhan Pokok seminggu sekali.
- g) Melakukan sosialisasi kepada masyarakat mengenai hak yang harus diterima Konsumen
- h) Tetap Melakukan Evaluasi secara berkala terhadap Kinerja Eselon II,III dan IV dilingkup Dinas Perdagangan.



BAB IV PENUTUP

Dalam manajemen pembangunan berbasis kinerja dan perbaikan pelayanan publik, setiap organisasi pemerintah melakukan pengukuran dan pelaporan atas kinerja institusi dengan menggunakan indikator yang jelas dan terukur. Bagi Satuan Kerja Perangkat Daerah, LKj menjadi bagian dari upaya pertanggungjawaban dan mendorong akuntabilitas publik. Sementara bagi publik sendiri, LKj akan menjadi ukuran akan penilaian dan juga keterlibatan publik untuk menilai kualitas kinerja pelayanan dan mendorong tata kelola pemerintahan yang baik.

LKj bagi Dinas Perdagangan Kabupaten Bone juga menjadi punya makna strategis, sebagai bagian dari penerjemahan tugas dan fungsi Dinas Perdagangan. Pengukuran-pengukuran kinerja telah dilakukan, dan dikuatkan dengan data pendukung yang mengurai bukan hanya pencapaian tahun pelaporan 2019 , namun juga melihat tren pencapaiannya dari tahun ke tahun, dan kontribusinya untuk pencapaian target akhir RENSTRA. Secara umum, nampak bahwa kinerja Dinas Perdagangan Kabupaten Bone pada tahun 2019 adalah baik, karena terdapat 2 indikator memenuhi kriteria sangat baik dan 4 indikator memenuhi kriteria baik.

Dari evaluasi dan analisis atas pencapaian sasaran dan IKU yang sudah diuraikan dalam bab III, terlihat bahwa kerja keras telah dilakukan oleh Dinas Perdagangan untuk memastikan pencapaian kinerja sebagai prioritas dalam pembangunan daerah. Upaya ini telah mencakup perumusan dan penetapan kinerja tahunan dan juga menengah sebagai bagian dari kebijakan strategis maupun tahunan daerah, khususnya dalam RENSTRA dan RENCANA KERJA (RENJA) 2019 , yang mencakup juga penentuan program/kegiatan dan alokasi anggarannya. Juga mencakup bukan hanya sekedar pelaksanaan program/kegiatan yang rutin dilakukan, namun juga pengembangan inovasi dalam berbagai bentuk.

Bagi instansi Dinas Perdagangan sendiri, ini bisa berarti perlunya peningkatan efektivitas dan pencapaian kinerja sehingga beberapa tantangan ini bisa dijawab.

Sebagai bagian dari perbaikan kinerja pemerintah daerah yang menjadi tujuan dari penyusunan LKj, hasil evaluasi capaian kinerja ini juga penting dipergunakan oleh instansi di lingkungan Dinas Perdagangan untuk perbaikan perencanaan dan pelaksanaan program/kegiatan di tahun yang akan datang.

Beberapa permasalahan dan solusi yang sudah dirumuskan akan menjadi tidak punya makna jika hanya berhenti menjadi laporan saja, namun harus ada rencana dan upaya konkret untuk menerapkannya dalam siklus perencanaan dan pelaksanaannya. Hal ini akan menjadikan LKj benar-benar menjadi bagian dari sistem monitoring dan evaluasi untuk pijakan peningkatan kinerja pemerintahan dan perbaikan layanan publik.

Watampone, 04 Februari 2020

Kepala Dinas Perdagangan



Drs. A. CHAERUL SALEH, SE, MM

Pangkat : Pembina Utama Muda, IV/c

Nip. 19680821 199103 1 010

Lampiran

REALISASI ANGGARAN SKPD TAHUN 2019

SKPD/UNIT KERJA : DINAS PERDAGANGAN

NO	PROGRAM	KEGIATAN	ANGGARAN	REALISASI	PERSENTASE	PERMASALAHAN	SOLUSI	KET
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Rp 25,800,000.00	Rp 23,913,439.00	92.69%			
		Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Rp 101,001,600.00	Rp 88,356,567.60	87.48%			
		Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Rp 7,498,000.00	Rp 6,198,000.00	82.66%			
		Penyediaan Komponen Inst. Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Rp 2,605,000.00	Rp 2,560,000.00	98.27%			
		Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Rp 37,500,000.00	Rp 36,280,000.00	96.75%			
		Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	Rp 386,248,110.00	Rp 385,775,585.00	99.88%			
		Pelaksanaan administrasi perkantoran	Rp 115,568,750.00	Rp 110,507,400.00	95.62%			
2	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional	Rp 600,000,000.00	Rp 595,144,000.00	99.19%			
		Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	Rp 669,500,000.00	Rp -	0.00%	Tidak adanya Pihak Ketiga yang memasukkan Penawaran pada Lelang yang dilakukan oleh ULP		
		Pengadaan Mebeleur	Rp 8,600,000.00	Rp -	0.00%	Anggran tidak mencukupi		

NO	PROGRAM	KEGIATAN	ANGGARAN	REALISASI	PERSENTASE	PERMASALAHAN	SOLUSI	KET
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Pemeliharaan Rutin/ Berkala Gedung Kantor	Rp 18,106,000.00	Rp 15,979,000.00	88.25%			
		Pemeliharaan Rutin Berkala Kendaraan Dinas operational	Rp 63,800,000.00	Rp 54,227,400.00	85.00%			
3	PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang- undangan	Rp 34,690,000.00	Rp 34,690,000.00	100.00%			
4	PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Rp 36,200,000.00	Rp 29,825,950.00	82.39%			
		Monitoring dan Evaluasi Capaian Kinerja dan Keuangan	Rp 29,900,000.00	Rp 29,899,828.00	100.00%			
5	PROGRAM PENUNJANG PEMERINTAHAN UMUM	Penyusunan Rencana Perangkat Daerah	Rp 42,000,000.00	Rp 30,648,800.00	72.97%			
6	PERLINDUNGAN KONSUMEN DAN PENGAMANAN PERDAGANGAN	Peningkatan Pengawasan Peredaran Barang dan Jasa	Rp 12,500,000.00	Rp 12,500,000.00	100.00%			
		Operasionalisasi dan Pengemb. UPT Kemetrolagian Daerah	Rp 65,750,000.00	Rp 65,741,666.00	99.99%	Belum adanya tenaga Ahli di Bidang Tera Ulang	Telah diminta Staf yang bisa Mengikuti DIKLAT yang dimaksud	

NO	PROGRAM	KEGIATAN	ANGGARAN	REALISASI	PERSENTASE	PERMASALAHAN	SOLUSI	KET
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Monitoring Bahan Kebutuhan Pokok	Rp 29,326,000.00	Rp 29,326,000.00	100.00%			
		Penanganan Pengaduan Konsumen	Rp 7,000,000.00	Rp 7,000,000.00	100.00%			
7	PENINGKATAN DAN PENGEMBANGAN EKSPOR	Sosialisasi Kebijakan Penyederhanaan Prosedur dan Dokumen Ekspor dan Impor	Rp 13,366,000.00	Rp 13,366,000.00	100.00%			
		Pengembangan Data Base Informasi Potensi Unggulan	Rp 13,010,000.00	Rp 12,760,000.00	98.08%			
		Promosi Produk Daerah	Rp 130,250,000.00	Rp 124,250,000.00	95.39%			
8	PENINGKATAN EFISIENSI PERDAGANGAN DALAM NEGERI	Kemudahan Perijinan Pengembangan Usaha	Rp 20,000,000.00	Rp 20,000,000.00	100.00%	Masih Kurangnya kesadaran Pengusaha untuk mengurus izin usaha	Melakukan Penyuluhan langsung ke masyarakat	
		Pengembangan pasar Lelang Daerah	Rp 16,000,000.00	Rp 15,950,000.00	99.69%			
		Pasar Murah	Rp 116,820,000.00	Rp 116,820,000.00	100.00%			
		Pengembangan Sarana Dan Prasarana Perdagangan Rakyat	Rp 4,795,496,000.00	Rp 4,714,607,533.51	98.31%			
		Sistem Resi Gudang	Rp 72,098,500.00	Rp 69,788,000.00	96.80%	Belum adanya tenaga ahli yang dapat mengoperasikan Gudang yang ada	Melakukan koordinasi dengan BAPEBTI	
		Bimbingan Teknis Pengelola Pasar dan Pergudangan	Rp 57,310,000.00	Rp 57,226,000.00	99.85%			

NO	PROGRAM	KEGIATAN	ANGGARAN	REALISASI	PERSENTASE	PERMASALAHAN	SOLUSI	KET
1	2	3	4	5	6	7	8	9
9	PROGRAM PEMBINAAN PEDAGANG KAKI LIMA DAN ASONGAN	Kegiatan Penyuluhan Peningkatan Disiplin Pedagang Kakilima dan Asongan	Rp 10,347,000.00	Rp 10,347,000.00	100.00%			
10	PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA DAGANG KECIL DAN MENENGAH	Pembinaan Peningkatan Promosi Produk UDKM	Rp 10,750,000.00	Rp 10,750,000.00	100.00%			
		Pelatihan Clean Produk dan Kemasan UDKM	Rp 10,000,000.00	Rp 10,000,000.00	100.00%			
	Jumlah		Rp 7,559,040,960.00	Rp 6,734,438,169.11	89.09%			

INDIKATOR KINERJA UTAMA DINAS PERDAGANGAN KABUPATEN BONE

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	PENJELASAN/FORMULASI PERHITUNGAN CAPAIAN TARGET KINERJA		SUMBER DATA	PENANGGUNG JAWAB
1	Meningkatnya Pertumbuhan Ekonomi dari sektor Perdagangan	Kontribusi sektor Perdagangan terhadap PDRB	<i>Jumlah Kotribusi PDRB dari Sektor Perdagangan</i>	x100%	BPS	BIDANG PENGEMBANGAN SARANA DISTRIBUSI DAN LOGISTIK
			<i>Jumlah total PDRB</i>			
		Persentase Pasar dalam Kondisi baik	<i>Jumlah Pasar dalam Kondisi Baik</i>	x100%	BIDANG PENGEMBANGAN SARANA DISTRIBUSI DAN LOGISTIK	
			<i>Jumlah Seluruh Pasar</i>			
		Persentase Potensi Komodity Unggulan Kabupaten yang terpublikasi	<i>Jumlah Potensi Komodity Unggulan yang terpublikasi</i>	x100%	BIDANG BINA USAHA PERDAGANGAN	BIDANG BINA USAHA PERDAGANGAN
			<i>Jumlah Keseluruhan Komodity Unggulan</i>			
		Cakupan bina kelompok pedagang/usaha informal %)	<i>Jumlah Kelompok Pedagang/Usaha informal yang dibina</i>	x100%	BIDANG DAGANG KECIL, MENENGAH DAN PRODUK DALAM NEGERI	BIDANG DAGANG KECIL, MENENGAH DAN PRODUK DALAM NEGERI
			<i>Jumlah Kelompok Pedagang/Usaha informal</i>			
2	Meningkatnya Perlindungan Konsumen	Persentase Alat UTTP yang Lolos Uji Tera Ulang	<i>Jumlah Alat UTTP yang Lolos Uji Tera Ulang</i>	x100%	BIDANG BAHAN POKOK DAN STRATEGIS	BIDANG BAHAN POKOK DAN STRATEGIS
			<i>Jumlah Alat UTTP yang Tera Ulang</i>			
		Persentase Laporan Konsumen yang diTindak Lanjuti	<i>Jumlah Laporan Konsumen yang di Tindak Lanjuti</i>	x100%		
			<i>Jumlah Laporan Konsumen</i>			